



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpb@kkp.go.id](mailto:ditjenpb@kkp.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 473 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan:

- a. penyusunan penetapan kinerja, rencana kerja tahunan, dan rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b. penyusunan rencana/program pembangunan daerah provinsi/kabupaten/kota di bidang perikanan budi daya;
- c. koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor dan/atau antar unit kerja bidang perikanan budi daya di pusat dengan di daerah provinsi/kabupaten/kota;
- d. pengendalian program dan kegiatan pengembangan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
- e. penyusunan evaluasi program dan kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,  
Ttd.  
TB.HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Tinggal Hermawan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 473 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN  
BUDI DAYA TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Renstra K/L 2025-2029.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya diperlukan Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Renstra ini merupakan dokumen yang menjabarkan kebijakan dan optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budi daya untuk meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional serta peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Dokumen ini akan menjadi acuan rencana pembangunan perikanan budi daya dalam lima tahun ke depan bagi pemangku kepentingan perikanan budi daya dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Kementerian/Lembaga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, pelaku usaha, asosiasi, praktisi, dan akademisi. Rencana ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

#### 1.1. Kondisi Umum

Sebagai Langkah awal dalam merancang strategi pembangunan sub sektor perikanan budi daya 5 (lima) tahun ke depan, dilakukan evaluasi terhadap kondisi umum. Evaluasi tersebut difokuskan pada pencapaian Renstra periode sebelumnya guna menilai tingkat keberhasilan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya.

##### 1.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020–2024

Pembangunan perikanan budi daya tahun 2020–2024 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor perikanan budi daya terhadap sektor perikanan nasional dan meningkatkan produksi perikanan budi daya berkelanjutan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Perbenihan Ikan;
- b) Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan;
- c) Pengelolaan Produksi dan Usaha;
- d) Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan; dan
- e) Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Adapun target Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana uraian berikut:

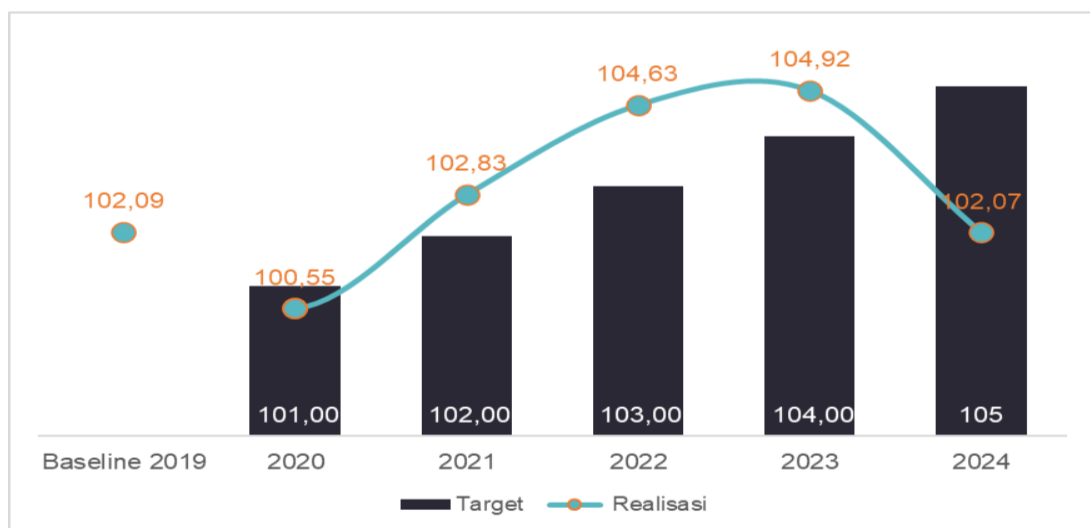
- a) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya dengan indikator:
  - 1) Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi) sebesar 101 pada tahun 2020 dan 105 pada tahun 2024; dan
  - 2) Rata-rata pendapatan pembudi daya Rp3.450.000,- pada tahun 2020 dan Rp3.700.000,- pada tahun 2024, sehingga terdapat kenaikan target Rp4.800.000 pada tahun 2024.
- b) Meningkatnya Ekonomi sektor perikanan budi daya dengan indikator:
  - 1) Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan budi daya sebesar Rp19,14 Milyar di tahun 2020 dan Rp23,77 Milyar di tahun 2024, sehingga terdapat kenaikan target pada tahun 2024 sebesar Rp49,98 Milyar;
  - 2) Korporasi Pembudi daya Ikan yang dikembangkan ditargetkan 10 unit di tahun 2023 dan 15 unit 2024; dan
  - 3) Tenaga Kerja yang terlibat di bidang perikanan budi daya dengan target 23.348 orang pada tahun 2022 dan 23.784 orang pada tahun 2024.
- c) Kawasan perikanan budi daya yang berkelanjutan dengan indikator kinerja:
  - 1) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan target level 4 pada tahun 2020 dan level 5 pada tahun 2022. Mulai tahun 2023 sudah tidak dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya lagi.
  - 2) Percontohan pengelolaan klaster kawasan budi daya berkelanjutan dengan target 10 kawasan pada 2020 dan 50 kawasan pada tahun 2024.
- d) Meningkatnya produksi perikanan budi daya dengan indikator kinerja:
  - 1) Produksi perikanan budi daya sebesar 18,44 juta ton pada tahun 2020 dan 22,65 juta ton pada tahun 2024, sehingga terdapat kenaikan target 24,85 di 2024; dan
  - 2) Produksi ikan hias sebesar 1,87 miliar ekor pada tahun 2020 dan 2,33 miliar ekor pada tahun 2024, sehingga terdapat kenaikan 1,73 di 2024.
- e) Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya dengan indikator kinerja: persentase Sampel Residu yang memenuhi ketentuan dengan target 97% di tahun 2022 – 2024.
- f) Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan indikator:
  - 1) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebesar 72 di tahun 2020 dan 85 pada tahun 2024;
  - 2) Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi sebesar 6 unit kerja pada tahun 2020 dan 14 unit kerja pada tahun 2024;
  - 3) Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan nilai realisasi anggaran sebesar  $\leq 1$  pada tahun 2020 dan  $\leq 0,5$  pada tahun 2024;
  - 4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPB dengan nilai 85 pada tahun 2020 dan 84 pada tahun 2024;
  - 5) Tingkat Maturitas SPIP level 3 pada tahun 2020 dan level 3,3 pada tahun 2024;

- 6) Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 60 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024;
- 7) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 88 pada tahun 2020 dan 93,76 pada tahun 2024;
- 8) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan nilai 85 tahun 2020 dan 86 pada tahun 2024; dan
- 9) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan target 70 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024.

Dari Sasaran Strategis tersebut, capaian kinerja IKU Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2020-2024 sebagai berikut :

a) Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan oleh KKP dalam mengukur tingkat kesejahteraan pembudi daya ikan. NTPi menggambarkan rasio perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh pembudi daya atas hasil usahanya (It) dengan indeks harga yang dibayarkan oleh pembudi daya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya usaha budi daya (Ib). Dengan kata lain, NTPi menunjukkan kemampuan tukar hasil produksi perikanan budi daya terhadap kebutuhan hidup dan biaya usaha produksi, serta daya tukar penerimaan usaha pembudi daya terhadap kebutuhan hidup dan biaya usaha budi daya secara riil yang dialami oleh pembudi daya. Capaian NTPi ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai berikut.



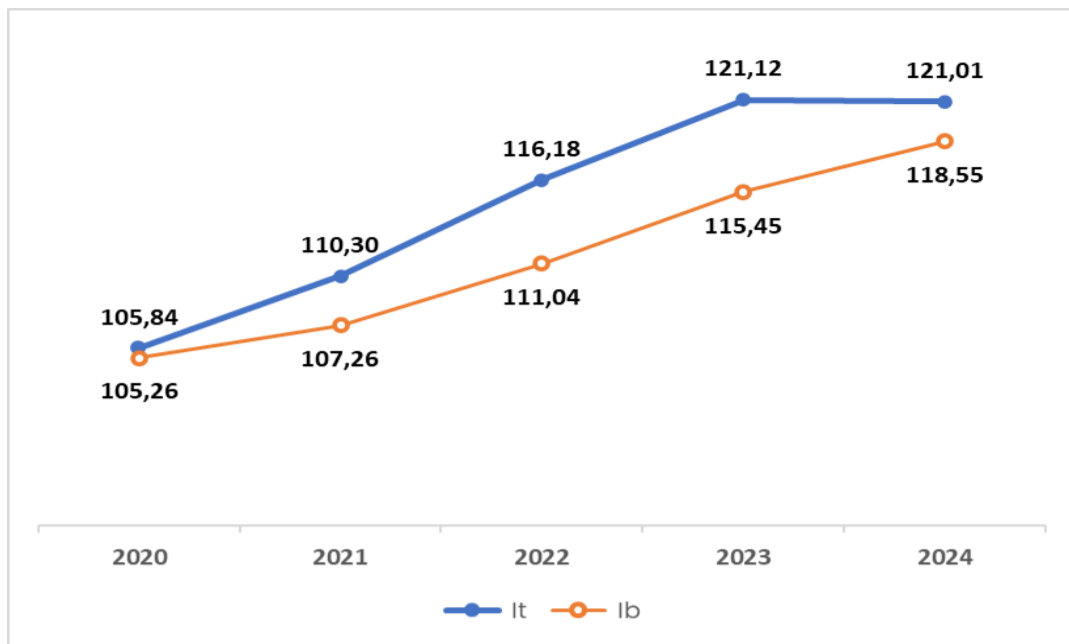
Gambar 1. Perkembangan NTPi Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS, 2025

Keterangan:

- Perhitungan NTPi Tahun 2019 menggunakan tahun dasar Tahun 2012
- Perhitungan NTPi Tahun 2020-2024 menggunakan tahun dasar Tahun 2018

Realisasi NTPi periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata 1,43% per tahun dari 2020 hingga 2023, namun terjadi penurunan sebesar -2,72% pada tahun 2024. Capaian NTPi tahun 2024 sebesar 102,07, masih di bawah target 105, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pembudi daya belum optimal sesuai target. Hal ini terjadi karena kenaikan pendapatan (Indeks Harga Diterima/It) tidak diimbangi secara signifikan oleh kenaikan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga (Indeks Harga Dibayar/Ib), sehingga daya tukar pembudi daya cenderung stagnan



Gambar 2. Perkembangan Indeks yang diterima (it) dan Indeks yang dibayarkan (ib) Tahun 2020 – 2024  
Sumber: BPS, 2024

Penurunan NTPi didorong oleh dua faktor utama. Pertama, melonjaknya biaya produksi, terutama pakan yang mencapai 60–70% dari total biaya, dengan harga yang terus naik akibat ketergantungan pada bahan baku impor (tepung ikan, bungkil kedelai), fluktuasi nilai tukar, dan biaya logistik yang tinggi. Selain itu, biaya benih unggul, listrik, obat-obatan, dan probiotik juga semakin memberatkan. Kedua, pendapatan pembudi daya tertekan akibat lemahnya posisi tawar di rantai pasok, dominasi tengkulak, jatuhnya harga saat panen raya karena pasokan berlebih dan minimnya fasilitas penyimpanan, serta tuntutan pasar yang ketat terhadap ukuran dan kualitas yang menyebabkan ikan dengan kualitas tidak sesuai standar dihargai lebih rendah.

b) Rata-rata Pendapatan Pembudi daya Ikan

Peningkatan pendapatan pembudi daya merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan budi daya. Pendapatan pembudi daya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan, termasuk rumput laut. Realisasi pendapatan pembudi daya ikan pada tahun 2020 sebesar Rp3.544.245,- dan Rp5.130.000,- pada tahun 2024.

c) Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berasal dari pendapatan PNBP lainnya berupa hasil samping kegiatan pembudidayaan ikan, pemeriksaan/pengujian laboratorium, pekerjaan dan informasi, hasil penjualan hasil produksi non litbang lainnya, penggunaan sarana prasarana sesuai tugas dan fungsi, dan jasa lainnya di Balai-Balai budi daya lingkup DJPB, PNBP pengelolaan BMN dan pendapatan non anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021

Realisasi Nilai PNBP dari Perikanan Budi Daya sebesar Rp23,50 Milyar di tahun 2020 dan Rp117,04 Milyar di tahun 2024. Realisasi PNBP mengalami kenaikan rata-rata sebesar 120 persen dibanding target dikarenakan terdapat setoran PNBP tinggi di tiga satker Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang menjadi satker Badan Layanan Umum (BLU) yakni BBPBAP Jepara dan BLUPPB Karawang

dengan hasil panen kegiatan modelling budi daya udang vaname, serta BPBAP Situbondo dengan hasil penjualan benih lobster.

d) Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya

Indikator tenaga kerja yang terlibat ini secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan sektor kelautan dan perikanan terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan, pemasaran, usaha garam, penyuluhan, dan karantina ikan. Khususnya jumlah tenaga kerja yang terlibat pada perikanan budi daya yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor kelautan dan perikanan. Sektor perikanan budi daya merupakan sektor yang melibatkan banyak keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan peningkatan sektor perikanan budi daya sebanding dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Adapun penyerapan tenaga kerja di perikanan budi daya meliputi kegiatan pengelolaan budi daya ikan air tawar, pengelolaan budi daya ikan air payau, pengelolaan budi daya ikan air laut dan pengelolaan budi daya rumput laut.

Selama kurun waktu 2022-2024, tenaga kerja yang terlibat di bidang perikanan budi daya mencapai 45.813 orang tahun 2022, 45.892 pada tahun 2023 dan 32.509 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022, jumlah tenaga kerja yang terlibat di bidang perikanan budi daya mengalami penurunan, hal ini terjadi karena indikator ini bergantung pada jumlah Bantuan Pemerintah yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

e) Korporasi Pembudi daya Ikan yang Dikembangkan

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah menginisiasi pengembangan korporasi Pembudi daya Ikan sejak tahun 2023 sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat posisi ekonomi pembudi daya dan mendorong transformasi struktur usaha dari skala mikro/kecil menjadi entitas yang lebih modern dan berkelanjutan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024, yang mencakup target pembentukan 350 Korporasi Petani dan Nelayan. Sejak dimasukkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 2023, program ini menunjukkan progres positif: terbentuk 10 korporasi pada tahun 2023 di sentra produksi utama seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku, kemudian meningkat menjadi 15 korporasi tambahan pada 2024 dengan ekspansi ke wilayah baru seperti Kalimantan Timur dan Bali. Setiap korporasi umumnya terdiri atas 20 - 50 pembudi daya, sehingga secara total telah melibatkan ratusan pembudi daya ikan di seluruh Indonesia. Korporasi ini dibentuk dalam bentuk badan hukum seperti koperasi atau kelompok usaha bersamadengan mayoritas kepemilikan modal berada di tangan pembudi daya sendiri, sebagai upaya mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengembangan korporasi dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen usaha, teknis budi daya, pasca panen, hingga pemasaran, dengan dukungan kolaborasi antar unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk fasilitasi akses pembiayaan. Hasilnya, korporasi mampu meningkatkan efisiensi produksi hingga 15–20% melalui pembelian sarana produksi secara kolektif, memperkuat posisi tawar dalam negosiasi harga, serta memperluas akses ke pasar domestik dan ekspor. Selain itu, pembudi daya juga mengalami peningkatan

kapasitas manajerial, keterampilan teknis, dan adopsi teknologi modern. Dengan capaian ini, korporasi pembudi daya ikan menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan pembudi daya menuju sektor perikanan budi daya yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

f) Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Indikator ini ditetapkan sampai dengan tahun 2021 saja karena terdapat perubahan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dimana mulai tahun 2022 Kegiatan pengembangan SKPT dialihkan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Capaian Tingkat Kemandirian SKPT sampai dengan tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah 3,67 dari target 4 di 3 lokasi yaitu Kota Sabang, Sumba Timur, dan Rote Ndao. Target Tingkat Kemandirian SKPT tidak tercapai karena tidak ada pembangunan fisik dan pandemi COVID-19 sehingga telah menyebabkan kegiatan pengembangan SKPT terhambat termasuk kegiatan pendampingan dan koordinasi.

g) Percontohan Pengelolaan Klaster Kawasan Budi Daya Berkelanjutan

Pengelolaan klaster kawasan budi daya berkelanjutan merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan perikanan budi daya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan keberlanjutan lingkungan. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan kawasan dengan memadukan aspek teknologi budi daya, manajemen usaha, serta tata kelola sumber daya yang ramah lingkungan.

Klaster budi daya dikembangkan sebagai model pengelolaan tambak terpadu yang melibatkan para pembudi daya secara kolektif dalam satu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan skala ekonomi, akses pasar yang lebih baik, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana produksi.

Sejak dimulainya program pada tahun 2020, jumlah kawasan klaster budi daya terus mengalami peningkatan signifikan sebagai hasil dari revitalisasi tambak tradisional dan pembangunan infrastruktur budi daya modern. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan penerapan konsep pengelolaan kawasan yang berbasis Klaster dan integrasi rantai pasok. Setiap Klaster umumnya mencakup area seluas 5–50 hektare dengan partisipasi ratusan pembudi daya. Capaian setiap Klaster dikembangkan dengan prinsip pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, meliputi: (i) Penggunaan benih unggul dan pakan berkualitas; (ii) Sistem pengairan terpadu dan ramah lingkungan; (iii) Monitoring kualitas air dan kesehatan ikan secara berkala; (iv) Pendampingan teknis dan pelatihan intensif kepada pembudi daya; (v) Penguatan kelembagaan usaha dan kemitraan dengan industri pengolahan.

Pembangunan Klaster selama tahun 2020-2024 telah tercapai sebanyak 50 Klaster di 12 Provinsi. Dampak positif Pengembangan Klaster antara lain: (i) Meningkatnya produktivitas kawasan perikanan budi daya hingga 30–50%; (ii) Meningkatkan kualitas produk perikanan budi daya melalui penerapan *good aquaculture practices*; (iii) Meningkatkan manajemen pengelolaan kawasan perikanan budi daya sehingga mengurangi risiko penurunan kualitas lingkungan; dan (iv) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudi daya ikan.

h) Produksi Perikanan Budi Daya

Produksi perikanan budi daya nasional selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang stabil, meskipun masih memerlukan

percepatan untuk mencapai target produktivitas yang lebih tinggi. Berdasarkan data hasil validasi tahun 2024, berikut adalah capaian volume produksi perikanan budi daya dari tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 1. Capaian Volume Produksi Perikanan Budi Daya Tahun 2020 - 2024

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	14.845.015	14.648.310	14.776.057	15.361.425	15.754.612
Udang	881.599	953.177	918.550	941.646	958.463
Rumput Laut	9.618.421	9.092.031	9.234.268	9.753.410	9.853.604
Bandeng	811.883	780.763	779.706	772.709	792.864
Kerapu	9.478	13.422	12.240	11.352	16.063
Kakap	5.418	8.464	8.642	7.746	10.563
Ikan Mas	560.669	651.238	508.724	483.365	524.781
Nila	1.172.633	1.300.529	1.356.654	1.368.542	1.563.327
Lele	993.768	1.041.422	1.101.625	1.136.619	1.158.418
Patin	327.146	332.023	340.444	348.379	383.209
Gurami	152.669	149.170	159.572	153.939	161.402
Ikan Lainnya	311.331	388.816	355.632	383.717	331.918

Sumber: Portaldata KKP, Oktober 2025

Data capaian produksi Tahun 2024 berbeda dengan apa yang termuat dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 yakni sebesar 17,18 Juta ton, karena data tersebut masih bersifat sementara dari Portaldata KKP yang belum divalidasi. Adapun data pada tabel di atas merupakan data yang bersumber dari Portaldata KKP yang sudah divalidasi secara nasional per bulan Oktober tahun 2025.

Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budi daya selama periode tahun 2020–2024 tercapai sebesar 1,52% per tahun. Peningkatan Produksi ini menunjukkan tren peningkatan yang positif, hal ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan berbagai program yang telah dilaksanakan pada 2020 - 2024.

Kontribusi terbesar perikanan budi daya berasal dari komoditas rumput laut. Produksi perikanan budi daya Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan terutama karena peningkatan produksi rumput laut yang didorong dengan semakin meluasnya penggunaan bibit rumput laut hasil kultur jaringan. Di samping itu, beberapa komoditas lain mengalami peningkatan produksi yang didorong telah mulai beroperasinya beberapa proyek prioritas perikanan budi daya seperti Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen dan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang.

Gambaran produksi berbagai komoditas pada kurun waktu 2020-2024 diuraikan sebagaimana berikut:

#### 1) Udang

Produksi udang nasional selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 2,2% per tahun. Pada tahun 2024, produksi udang mencapai 47,99% dari target, meskipun belum optimal akibat tumpang tindih tata ruang lahan budi daya dan penurunan akses pasar ekspor, khususnya ke Amerika Serikat. Namun, produksi tetap meningkat dibanding tahun sebelumnya, seiring bergulirnya program terobosan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, seperti Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di

Kebumen. Upaya peningkatan produksi dan nilai usaha udang dilakukan melalui rehabilitasi infrastruktur tambak, bantuan sarana budi daya, pengembangan klaster berbasis manajemen kawasan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha, peningkatan teknologi budi daya ramah lingkungan, serta pendampingan teknis yang intensif dan masif, didukung kolaborasi lintas sektor untuk memperlancar akses infrastruktur, permodalan, dan pasar.

2) Kerapu

Produksi ikan kerapu menunjukkan tren positif dari tahun 2020 hingga 2024, dengan capaian sebesar 16.063 ton pada 2024 atau 25,5% dari target 63.052 ton. Tidak tercapainya target tersebut sebagian besar disebabkan oleh penyesuaian alokasi produksi pada penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Untuk mendorong peningkatan produksi budidaya kerapu, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melaksanakan beberapa program diantaranya penyediaan benih bermutu melalui UPT dan unit pembenihan skala rumah tangga, serta mendorong pengembangan kawasan budi daya laut melalui bantuan KJA di daerah potensial, yang turut memperluas klaster budi daya kerapu secara nasional.

3) Kakap

Produksi ikan kakap tumbuh rata-rata 8,57% per tahun selama 2020–2024, namun hanya mencapai 14,9% dari target tahunan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh penambahan target produksi dari kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sehingga target produksi ikan Kakap hasil budi daya mengalami peningkatan dari target sebelumnya. Terbatasnya ketersediaan benih bermutu, serta berkurangnya tambak tradisional karena beralih ke sistem intensif menjadi faktor penyebab lain tidak tercapainya target produksi ikan Kakap. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendorong pengembangan benih ikan kakap di UPT, serta memberikan bantuan KJA laut di daerah potensial, guna memperluas akses teknologi dan mendorong pertumbuhan budi daya kakap berbasis kawasan.

4) Bandeng

Produksi bandeng mengalami kenaikan 2,61% pada tahun 2024, meski sempat turun akibat pandemi pada 2020–2022. Target produksi belum tercapai karena terbatasnya sentra pembenihan dan ekspor nener yang mengurangi ketersediaan benih dalam negeri. Untuk meningkatkan produksi, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menerapkan strategi pengembangan klaster budi daya bandeng, mengembangkan *broodstock* berkualitas, mendorong teknologi efisien berbasis lingkungan, serta menjalin kemitraan dengan *stakeholder* guna memperkuat klaster dan rantai nilai budi daya bandeng.

5) Patin

Produksi patin mengalami kenaikan rata-rata 4,09 selama 2020–2024, meski sempat turun akibat pandemi pada 2020–2022. Belum tercapainya produksi ikan patin di tahun 2023 antara lain disebabkan kendala pemasaran ikan patin pada beberapa sentra produksi di Indonesia, selain itu tingkat efisiensi produksi masih rendah. Pangsa pasar ikan patin saat ini sebagian besar mengandalkan pasar lokal dalam bentuk ikan segar, adapun pasar ekspor dalam bentuk fillet terkendala tingginya harga ikan patin di pasar lokal. Untuk itu perlu didorong pengembangan ikan patin melalui *integrated farming* yang terinteraksi hulu-hilir, kerja sama sinergi baik lintas sektoral, swasta maupun stakeholders lain. Kerja sama diarahkan dalam rangka penciptaan peluang pasar baru seperti Arab Saudi dan daerah Timur

Tengah lainnya, diversifikasi produk, pengembangan input teknologi dan pengembangan kawasan budi daya ikan patin secara terintegrasi.

6) Nila

Produksi ikan nila meningkat rata-rata 7,58% per tahun, dengan capaian 63,5% dari target pada 2024. Belum tercapainya target disebabkan adanya kebijakan penataan KJA di perairan umum. Untuk meningkatkan produksi ikan nila, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendorong produksi nila dengan sistem bioflok dan mengembangkan budi daya nila di tambak yang dikenal sebagai budi daya ikan nila salin. Kegiatan lain guna mendorong produksi ikan nila antara lain pengembangan kampung budi daya nila, budi daya intensif berbasis bioflok dan *running water system*, penggunaan pakan mandiri.

7) Ikan Mas

Produksi ikan mas mengalami peningkatan 8,57% pada tahun 2024, dengan target yang belum tercapai karena kebijakan pembatasan kegiatan perikanan budi daya seperti KJA di perairan umum dan penurunan preferensi masyarakat dalam mengkonsumsi ikan mas. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk terus mendorong pemulihan produksi ikan mas melalui intensifikasi teknologi budi daya dan pakan lokal, penguatan kemitraan usaha, pengembangan minapadi, serta perluasan akses pasar dan peningkatan nilai tambah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

8) Lele

Produksi ikan lele tumbuh rata-rata 3,92% per tahun dengan kinerja yang cukup stabil sejak 2021, seiring dengan pemulihan pasca-pandemi. Keberhasilan ini didukung oleh kemudahan proses budi daya ikan lele dan permintaan lokal yang tinggi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendorong penggunaan induk unggul dan benih bermutu, penerapan teknologi bioflok dan kolam terpal, dan penggunaan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal. Bersamaan dengan itu juga dikembangkan dan dilakukan perluasan pasar lokal dan ekspor.

9) Gurame

Produksi gurame tumbuh rata-rata 1,5% per tahun menunjukkan kinerja yang positif. Angka capaian produksi tahun 2024 belum mencapai target produksi dengan capaian sebesar 24,7% dari target 653.800 ton. Meningkatnya produksi ini terutama disebabkan karena nilai ekonomis ikan gurame yang cukup tinggi dan pemasarannya yang masih terbuka. Produksi Gurame masih didominasi pada beberapa sentra-sentra produksi yang sudah ada, sedangkan di sisi lain kapasitas usaha yang dijalankan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan produksi gurame dapat dioptimalkan melalui segmentasi usaha budi daya gurame dan upaya untuk mengatasi permasalahan penyakit ikan gurame.

10) Rumput Laut

Rumput laut memberikan kontribusi terbesar terhadap volume produksi perikanan budi daya nasional rata-rata sebesar 63,08% dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,69% per tahun pada periode tahun 2020-2024. Kontribusi volume terbesar ini disebabkan oleh siklus budi daya rumput laut yang lebih banyak dalam satu tahun, jumlah pembudi daya yang lebih banyak, karena penerapan teknologi sederhana, dan memerlukan modal kecil, serta akses pasar yang luas. Pembangunan laboratorium kultur jaringan di sentra budi daya rumput laut juga mendorong penggunaan bibit rumput laut kultur jaringan yang lebih luas yang secara langsung berperan dalam peningkatan produksi rumput laut nasional.

Untuk lebih mendorong produksi rumput laut, Pemerintah melaksanakan program hilirisasi rumput laut untuk meningkatkan permintaan rumput laut, meningkatkan nilai tambah produk turunan rumput laut dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru. Selain mengembangkan komoditas unggulan seperti *Eucheuma Cottonii* dan *Gracillaria* sp., pemerintah juga mengembangkan spesies rumput laut lain seperti *Eucheuma spinosum*, *Ulva* sp., *Sargassum* sp. dan *Caulerpa* sp. yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap produksi rumput laut nasional.

Capaian produksi perikanan budi daya secara keseluruhan selama periode 2020–2024 didukung oleh kebijakan strategis seperti industrialisasi perikanan budi daya, penguatan *broodstock center*, dan pengembangan sistem produksi berkelanjutan berbasis klaster, yang menjadi fondasi transformasi sektor ini menuju produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan yang lebih inklusif.

Walaupun produksi perikanan budi daya pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,52% per tahun, namun produksi ini belum dapat mencapai target nasional yang ditetapkan. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 hingga 2022 berdampak langsung terhadap produksi perikanan budi daya selama periode 2020-2024. Selama masa pandemi aktivitas budi daya terganggu akibat keterbatasan akses dan distribusi sarana produksi, operasional budi daya serta kendala pemasaran.

Berbagai upaya pemulihan produksi perikanan budi daya pasca COVID-19 telah dilakukan pemerintah diantaranya penguatan sistem produksi secara menyeluruh. Pada tahun 2023 upaya tersebut menunjukkan keberhasilan dengan terjadinya peningkatan produksi perikanan budi daya pada beberapa komoditas unggulan. Tren peningkatan ini diharapkan dapat terus berlanjut di masa yang akan datang dengan dukungan berbagai program pemerintah.

i) Produksi ikan hias

Ikan hias merupakan komoditas perikanan budi daya yang memiliki nilai tambah tinggi dan potensi ekonomi menjanjikan. Berdasarkan Sensus Pertanian BPS 2023, ikan hias memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan sektor budi daya. Komoditas ini terbagi menjadi ikan hias air tawar dan air laut, dengan ikan hias air tawar sebagai jenis yang paling banyak dibudidayakan karena mudah dikembangkan, membutuhkan modal kecil, serta lahan dan media yang sederhana bahkan dapat memanfaatkan wadah bekas layak pakai. Pada tahun 2024, produksi ikan hias mencapai 1,52 miliar ekor atau 88,12% dari target 1,73 miliar ekor, menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi didukung oleh semakin tingginya permintaan global terhadap ikan hias asli Indonesia, seperti arwana yang kini mulai menembus pasar Amerika dan Eropa. Pemulihan pasca-pandemi juga turut mendorong pertumbuhan sektor ini, termasuk peningkatan ekspor yang mengangkat posisi Indonesia sebagai pengeksport ikan hias terbesar kedua di dunia (data Trademap 2023). Untuk memperkuat pengembangan sektor ini, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah menetapkan beberapa wilayah sebagai kampung ikan hias, seperti di Bogor, Karawang, Blitar, dan Kediri, dengan komoditas unggulan seperti koi, mas koki, dan cupang. Program ini diharapkan mendorong inovasi, pengembangan strain lokal non-invasif, serta pemasaran ikan hias endemik yang eksotis dan diminati pasar internasional.

Tabel 2. Capaian Volume Produksi Ikan Hias Tahun 2020 - 2024

Tahun	Volume Produksi (Juta Ekor)	Nilai Produksi (Rp Miliar)
2020	1.498	7.376
2021	1.607	7.657
2022	1.477	6.712
2023	1.510	6.683
2024	1.586	7.022
Kenaikan Rata-Rata (%)	1,62	-0,97

- j) Persentase Jumlah Sampel Residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu).

Jaminan mutu dan keamanan pangan suatu produk perikanan budidaya saat ini sudah merupakan persyaratan dalam perdagangan dan keberlanjutan produksi perikanan budi daya yang harus dipenuhi. Dalam upaya menghadapi persaingan yang cukup ketat di pasar global maka peningkatan daya saing produk perikanan budi daya harus dapat dilakukan, salah satunya dengan mengendalikan kandungan residu pada produk perikanan budi daya. Kegiatan pengendalian residu produk perikanan budi daya di Indonesia diimplementasikan melalui sistem pengendalian residu nasional yang dituangkan dalam Rencana Monitoring Residu Nasional-*National Residue Monitoring Plan (NRMP)*. Capaian sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 100%.

- k) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
- 1) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian tahun 2024 sebesar 86,80%;
  - 2) Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari dengan capaian tahun 2024 sebanyak 15 satker;
  - 3) Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian tahun 2024 sebesar 0,06%;
  - 4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPB dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 84,054;
  - 5) Tingkat Maturitas SPIP dengan capaian tahun 2024 pada level 3,3;
  - 6) Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian tahun 2024 sebesar 93,33;
  - 7) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian tahun 2024 sebesar 92,50;
  - 8) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya capaian tahun 2024 sebesar 86,99; dan
  - 9) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian tahun 2024 sebesar 82,56.

#### 1.1.2. Penghargaan yang Diraih Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2020-2024

Penghargaan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya merupakan sebuah capaian positif atas kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Selama periode tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menerima berbagai macam antara lain yaitu:

- a. Tahun 2021
  - 1) BBPBAP Jepara meraih predikat Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Tahun 2022
  - 1) BPKIL Serang sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Predikat Pelayanan Prima Tahun 2022 untuk Pelayanan Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- c. Tahun 2023
  - 1) Juara 1 dan 2 Juara video dokumenter Program Prioritas pada Lomba Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB) 2023;
  - 2) BLUPPB Karawang sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Predikat Pelayanan Prima Tahun 2023;
  - 3) BPKIL Serang sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah kelompok Rentan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023;
  - 4) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai unit organisasi berpredikat Informatif dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023; dan
  - 5) Direktorat Pakan dan Obat Ikan sebagai Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) pada penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2023.
- d. Tahun 2024
  - 1) Juara 1 video dokumenter Program Prioritas pada Lomba Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB) 2024;
  - 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai unit organisasi berpredikat Informatif dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024; dan
  - 3) BPKIL Serang sebagai unit organisasi berpredikat terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP tahun 2024.

### 1.1.3. Kerja Sama yang sudah dilakukan

Pelaksanaan kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya didukung oleh berbagai kegiatan kerja sama selama periode tahun 2020-2024. Kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan untuk mendukung kegiatan prioritas meliputi kerja sama luar negeri dan antarlembaga dalam rangka pengembangan perikanan budi daya.

- a. *Support to upscaling and adoption of innovations and best practices for sustainable intensification and expansion of aquaculture in Asia (TCP/RAS/3808)*

Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI) atau Gerakan Swasembada Pakan adalah program nasional yang bertujuan menyediakan pakan ikan murah berbasis bahan lokal bagi pembudi daya ikan air tawar, khususnya ikan patin (*Pangasius*), guna mengurangi ketergantungan pada pakan impor atau komersial. Program ini didukung oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bekerja sama dengan FAO melalui *Technical Cooperation Programme*, dengan lokasi percontohan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sejak tahun 2022 ditetapkan sebagai Kampung Budidaya Ikan Patin.

Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis produsen pakan skala kecil dalam merancang formulasi pakan, memperluas produksi, meningkatkan kualitas pakan, menerapkan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), serta menyelesaikan hambatan teknis dalam efisiensi

produksi pakan lokal. Hasilnya, ketersediaan pakan berkualitas dan hemat biaya meningkat, sehingga mendorong efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan pembudi daya.

Beberapa keluaran utama proyek meliputi:

- 1) pengumpulan data tentang ketersediaan, biaya, dan potensi bahan pakan lokal serta kebutuhan nutrisi spesies budidaya;
- 2) penyempurnaan formulasi pakan ikan patin berbasis bahan lokal;
- 3) pengembangan model percontohan budidaya patin dengan pakan mandiri yang sesuai standar CPPIB;
- 4) diseminasi pengetahuan dan praktik budidaya berkelanjutan; dan
- 5) penyusunan panduan kebijakan untuk mendukung intensifikasi perikanan budidaya yang berkelanjutan di tingkat regional dan nasional.

b. Kerja Sama Sinergitas Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya di Kabupaten Kebumen

Dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan budi daya khususnya untuk komoditas udang, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk melakukan sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya kawasan perikanan budi daya.

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- 1) peningkatan produksi komoditas perikanan budi daya;
- 2) pengembangan dan penerapan teknologi perikanan budi daya;
- 3) pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan budi daya;
- 4) pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah di Kabupaten Kebumen; dan
- 5) kontribusi bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Objek dari kegiatan kerja sama ini adalah lahan seluas kurang lebih 100 hektar yang terletak di Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Klirong di Kabupaten Kebumen. Salah satu bentuk capaian kerja sama ini yaitu terbangunnya tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret 2023.

c. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan *The Departement of Health and Social Care of The United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland* tentang Kemitraan *Flemming Fund* untuk Resistensi Antimikroba pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan di Indonesia

Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) dengan pendekatan *One Health* merupakan langkah nyata Indonesia dalam mengatur penggunaan antimikroba secara bijak, sejalan dengan rencana aksi global AMR yang telah disepakati dunia. Rencana ini dirancang bersama oleh empat kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai bagian dari implementasi tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bekerja sama dengan *Department of Health and Social Care* (DHSC) Inggris dalam proyek "*The Fleming Fund Partnership for Antimicrobial Resistance Control on Aquaculture in Indonesia*". Proyek ini bertujuan memperkuat sistem pemantauan AMR dan penggunaan antimikroba (AMU) di sektor perikanan budi daya melalui pendekatan multisektoral.

*Fleming Fund*, yaitu program bantuan pemerintah Inggris, mendukung 25 negara di Afrika dan Asia dalam mengatasi AMR, termasuk Indonesia. Proyek di Indonesia berlangsung selama dua tahun (10 Maret 2020–31 Maret 2023) dengan total hibah sebesar £909.456. Kegiatannya mencakup perbaikan desain surveilans, renovasi, dan pengadaan peralatan laboratorium di Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang (BPKIL), peningkatan kapasitas teknisi laboratorium, ahli epidemiologi, dan analisis genomik, serta penguatan koordinasi antarsektor terkait AMR. Kerja sama ini secara langsung mendukung pencapaian target dalam Rencana Aksi Nasional AMR 2020–2024, khususnya di sektor perikanan budi daya.

## 1.2. Kegiatan Terobosan Tahun 2020 – 2024

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan terobosan dalam kurun waktu 2020-2024. Kegiatan terobosan tersebut secara langsung dapat diterima manfaatnya oleh pembudi daya dan diharapkan dapat mempunyai dampak dalam peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan budi daya.

### 1.2.1. Kampung Perikanan Budi Daya

Membangun kampung-kampung pembudidayaan ikan berbasis kearifan lokal dengan mengembangkan komoditas unggulan menjadi salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga 2024 dan merupakan salah satu implementasi kebijakan Ekonomi Biru Kelautan dan Perikanan. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023 telah ditetapkan 210 kabupaten/kota sebagai lokasi Kampung Perikanan Budidaya. Mulai dari pengembangan sistem perbenihan yang fokus pada produksi varian komoditas unggul yang potensial dikembangkan dan menjamin sistem logistik benihnya secara efisien. Kemudian pengembangan sistem produksi yang fokus pada penciptaan efisiensi produksi, dan produktivitas budidaya serta memenuhi prinsip budidaya ikan yang baik. Upaya ini meliputi pengembangan inovasi teknologi yang aplikatif, efisien dan adaptif, pengembangan pakan mandiri yang efisien, dan penerapan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Selanjutnya penguatan kapasitas SDM para pelaku dan kelembagaan di sentra-sentra produksi, serta mendorong pengembangan sistem bisnis terintegrasi (*integrated aquaculture business*) di sentra produksi untuk menjamin efisiensi dan market.

Intervensi yang telah dilakukan pemerintah untuk mendukung pengembangan kampung perikanan budidaya diantaranya melalui bantuan pemerintah, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kelautan dan Perikanan, sinergi dengan instansi/lembaga termasuk lembaga pembiayaan usaha, serta mobilisasi penyuluh dan petugas dinas. Semangat dan produktivitas pembudi daya, dukungan *stakeholders*, serta sinergi program kegiatan pihak terkait sangat menentukan capaian perkembangan perikanan budi daya di kampung perikanan budi daya.

Untuk mengoptimalkan pembangunan perikanan budi daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri global di lokasi kampung perikanan budidaya ke depan, maka program dan kegiatan selanjutnya diarahkan pada mekanisasi dan otomatisasi, sistem budi daya terintegrasi dan multi usaha, serta pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.

### 1.2.2. Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan

Program modeling budi daya rumput laut di tiga lokasi yaitu Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan masing-masing seluas 50 hektar diarahkan pada sistem pengelolaan budidaya

rumput laut yang terintegrasi dan mengimplementasikan konsep ekonomi biru, sehingga akan mampu meningkatkan produksi maupun produktivitas untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan usaha budidaya.

Potensi lahan untuk pengembangan budi daya rumput laut di lokasi tersebut masih sangat signifikan. Rote Ndao, dari 32.000 hektar area potensial, tingkat pemanfaatannya baru mencapai 6,9%; sedangkan di Wakatobi, pemanfaatan telah mencapai 70% dari total potensi area seluas 5.000 hektar. Program ini berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) yang meliputi penyediaan lahan untuk modelling, sarana, dan infrastruktur pendukung serta penyiapan industri hilirisasi rumput laut. Strategi modelling diciptakan untuk meningkatkan produksi sekaligus mengembangkan hilirisasi rumput laut di dalam negeri dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama kegiatan budidaya di sektor hulu. Dalam implementasinya, modeling budi daya rumput laut Wakatobi telah menghasilkan sekitar 120 ton rumput laut basah.

#### 1.2.3. Budi Daya Nila Salin Berbasis Kawasan

Pembangunan modeling budi daya ikan nila salin berbasis kawasan (80 hektar) ditujukan sebagai etalase atau contoh bagi pelaku usaha budi daya ikan nila salin dan investor dalam pengembangan budi daya ikan nila salin di Indonesia. Modeling budi daya ikan nila salin ini merupakan sistem budi daya ikan nila salin dalam satu kawasan, dengan satu pengelolaan yang terpadu yang mencakup berbagai aspek untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan dan ekosistemnya, serta memastikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Pembangunan dan penataannya dilaksanakan sesuai dengan konsep keberlanjutan, seperti pemisahan saluran *intake* dan outletnya, penyediaan tandon dan manajemen sistem pengairan yang terpadu.

Modeling ikan nila salin diharapkan dapat meningkatkan produktivitas budi daya menjadi sebesar 87 ton per hektar per siklus. Produktivitas tersebut jauh lebih tinggi dari produktivitas tambak nila salin tradisional yang hanya sekitar 0,6 ton per hektar per tahun. Produksi modeling budi daya ikan nila salin diharapkan dapat mencapai sekitar 7.020 ton per siklus atau senilai Rp 210,6 miliar dengan asumsi harga jual ikan nila salin Rp30.000 per kg.

#### 1.2.4. Budi Daya Kepiting Berbasis Kawasan

Modeling budi daya Kepiting dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur di lahan seluas 30 hektar. Konsep pembangunan modeling budi daya kepiting adalah pembangunan kawasan budi daya kepiting yang terintegrasi, yang terdiri dari unit *hatchery*, *nursery*, pembesaran kepiting, budidaya pakan alami/kerang, dan pasca panen. Pembangunan Modeling budi daya kepiting ini dilaksanakan dengan menerapkan IPAL, saluran inlet, dan outlet terpisah dan pengaturan kotak pemeliharaan.

Modeling ikan nila salin diharapkan dapat meningkatkan produktivitas budi daya menjadi sebesar 14 ton per hektar per tahun. Produktivitas tersebut jauh lebih tinggi dari produktivitas budi daya kepiting tradisional yang hanya sekitar 500 kg per hektar per tahun. Dengan modeling budi daya kepiting ini diharapkan dapat menjadi contoh/diseminasi bagi para pembudi daya dan pelaku usaha, dalam rangka revitalisasi tambak yang kurang produktif untuk mendukung peningkatan ekonomi lokal dan mendukung peningkatan ekspor kepiting Indonesia.

#### 1.2.5. Budi Daya Lobster Berbasis Kawasan

Pembangunan modeling budi daya lobster merupakan tindak lanjut implementasi terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.). Pembangunan modeling ini merupakan salah

satu strategi pemerintah untuk memperkuat peran Indonesia dalam pengelolaan lobster. Konsep pembangunan modeling budi daya lobster ini adalah mengintegrasikan kegiatan pendederan dan pembesaran lobster, serta lokasi budi daya kekerangan (kerang coklat) sebagai sumber pakan lobster dalam suatu kawasan. Selain itu di modeling ini menerapkan IPAL dan peningkatan teknologi budi daya lobster.

Modeling budi daya lobster dibangun di lokasi BPBL Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dimana Batam merupakan daerah sumber pakan yang sangat mendukung keberhasilan untuk budi daya lobster.

#### 1.2.6. Major Project Revitalisasi Udang dan Bandeng

Program Revitalisasi Udang dan Bandeng merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan ekspor. Dengan fokus pada peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan keberlanjutan lingkungan, proyek ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan berbagai lembaga riset seperti BRIN.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan dan revitalisasi kawasan tambak udang dan bandeng dengan capaian 42 klaster terdiri dari 9 klaster bandeng dan 33 klaster udang yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota.

Tabel 3. Capaian Revitalisasi Tambak Sentra Produksi Udang dan Bandeng Tahun 2020 - 2024

Uraian	Capaian (Klaster)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Revitalisasi Tambak Udang	5	2	16	8	2
Revitalisasi Tambak Bandeng	-	-	-	5	4
Jumlah	5	2	16	13	6

#### 1.2.7. Milenial Shrimp Farming (MSF)

Program *Millenial Shrimp Farming* (MSF) atau Tambak Milenial merupakan salah satu terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendorong peningkatan produksi udang nasional sekaligus menarik minat generasi muda agar terlibat dalam pembangunan industri perikanan budi daya. Konsep ini menggabungkan pendekatan ramah lingkungan, efisiensi produksi, dan penerapan teknologi digital, sehingga menjamin keberlanjutan program hingga generasi mendatang.

Sebagai percontohan, instalasi MSF telah dibangun di dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yaitu di BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo. Tambak MSF di BBPBAP Jepara memanfaatkan teknologi *Oxy-Mix Fine Bubble* yang menghasilkan *nano* dan *micro bubbles* dari udara bebas maupun oksigen cair untuk menjaga kestabilan kadar oksigen. Sementara itu, di BPBAP Situbondo dikembangkan inovasi seperti *oxibam* dan sistem *hyper density* yang mampu meningkatkan padat tebar hingga 1.000 ekor/m<sup>3</sup>. Teknologi ini memungkinkan produktivitas mencapai 80–90 ton per hektar dalam masa pemeliharaan 60–70 hari.

Selain teknologi aerasi, MSF juga memanfaatkan digitalisasi melalui pencatatan data teknis secara real time, meliputi kualitas air, pakan, biomass, hingga pertumbuhan harian. Proses ini dapat dipantau dari ruang kontrol maupun melalui perangkat digital, sehingga efisiensi operasional meningkat dan risiko penyakit dapat diminimalkan. Integrasi teknologi dengan aplikasi *smart farming* semakin memudahkan petambak milenial dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Meskipun masih menghadapi tantangan seperti penurunan kualitas air baku dan ancaman penyakit, program MSF menunjukkan hasil yang menjanjikan. Konstruksi tambak yang fleksibel, produktivitas tinggi, serta keuntungan ekonomis yang lebih besar menjadi daya tarik utama. Keberhasilan tambak milenial di Jepara dan Situbondo dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi generasi muda untuk terjun ke sektor budi daya udang, seperti yang telah diterapkan di beberapa lokasi.

#### 1.2.8. Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)

Kegiatan PITAP telah berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuannya, sebagaimana Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan PITAP, yaitu untuk meningkatkan peran serta dan pendapatan masyarakat di lokasi PITAP serta merehabilitasi prasarana irigasi tambak. Hal ini dibuktikan dengan hasil kajian dampak PITAP di 4 (empat) kabupaten penerima bantuan PITAP tahun 2023 yang telah menyerap tenaga kerja di lokasi kegiatan sebanyak 84.618 orang dengan nilai upah yang dibayarkan sebesar Rp2.938.677.000. Selain berdampak langsung kepada pekerja harian, saluran tambak yang direhabilitasi dalam kegiatan PITAP berdampak pada peningkatan produksi dan juga pendapatan pada pembudi daya ikan di lokasi kegiatan PITAP.

Berdasarkan hasil kajian dampak pelaksanaan kegiatan PITAP, terdapat peningkatan produksi perikanan pada lokasi penerima manfaat seperti Kabupaten Bekasi (107,55%), Kabupaten Brebes (107,64%), Kabupaten Kendal (55,85 %) dan Kabupaten Karawang (32,69%).

Pendapatan pembudi daya ikan yang tergabung dalam Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA) pada lokasi kajian dampak pelaksanaan kegiatan PITAP tahun 2023 mengalami peningkatan pendapatan signifikan yaitu di Kabupaten Brebes dengan pendapatan sebesar 151,93%, Kabupaten Bekasi rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 99,20%, Kabupaten Kendal rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 54,83% dan diikuti oleh Kabupaten Karawang dengan rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 21,66%.

Luas lahan yang terairi pada lokasi kajian dampak pelaksanaan PITAP tahun 2023 mencapai 1.930 hektar. Meningkatnya luas lahan yang terairi tersebut, memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, diantaranya aspek teknis, aspek sumber daya manusia, aspek finansial, dan aspek lokasi dan lingkungan.

Keberhasilan kegiatan PITAP merupakan wujud dari peran aktif POKLINA, kelembagaan yang mengelola jaringan irigasi yang ada. Oleh karenanya, diperlukan upaya penumbuh kembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan POKLINA agar menjadi wadah kelembagaan masyarakat yang kuat dalam pengelolaan saluran irigasi perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

#### 1.2.9. Program Induk Udang Vaname Unggul Nusa Dewa

Program Induk Udang Vaname Unggul Nusa Dewa yang diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Oktober 2022 menjadi tonggak penting dalam upaya swasembada induk udang nasional. Program ini menunjukkan progres signifikan dengan capaian produktivitas tinggi melalui uji performa multilokasi. Induk udang vaname unggulan hasil pemuliaan ini memiliki kelebihan tumbuh lebih cepat, toleran penyakit, dan mampu bersaing dengan produk internasional. Target utamanya adalah menopang produksi udang nasional serta mengurangi ketergantungan impor. Pengembangan dilakukan melalui penyempurnaan sumber daya genetik, pembentukan *multiplication center*, serta pengujian di berbagai lokasi budi daya. BPIU2K Karangasem telah mendistribusikan 16.800 ekor induk Nusa Dewa pada 2024, dengan total distribusi 2022–2024 mencapai 42.548 ekor yang tersebar di sembilan provinsi. Selain itu, empat UPT DJPB yakni BPBP

Ujung Batee, BPBAP Takalar, BBPBAP Jepara, dan BPBAP Situbondo turut mendukung penyebaran induk unggul ini.

Varian Nusa Dewa telah dikembangkan menjadi lima *line*, yaitu: *Fast Growth* (pertumbuhan cepat), *Balance* (pertumbuhan seimbang dan tahan penyakit), Resisten WSSV, Toleran AHPND, serta *Plant Based Protein* (adaptif terhadap pakan berbasis nabati). Keunggulan ini menjawab kebutuhan pembudi daya sekaligus menekan biaya produksi. Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan, 42 pelaku usaha swasta ikut mengembangkan Nusa Dewa di berbagai daerah, menandakan kepercayaan industri terhadap produk nasional. Dari sisi inovasi, Nusa Dewa dikembangkan dengan platform *molecular breeding* dan telah memperoleh HAKI untuk marka molekuler resisten WSSV, serta ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 181 Tahun 2023.

Lebih jauh, Nusa Dewa telah menyelesaikan *whole genome sequence* (WGS) sehingga menjamin keaslian genetik. Capaian ini menjadi bukti nyata upaya Indonesia menuju kemandirian dalam pemuliaan induk udang, serta penggerak utama kebangkitan industri perudangan nasional.

#### 1.2.10. Pengembangan *Broodstock Center*

*Broodstock Center* adalah unit yang dikembangkan untuk menghasilkan induk unggul untuk menghasilkan benih bermutu. Kegiatan pengembangan induk unggul telah dikembangkan di beberapa UPT seperti BBPBAT Sukabumi, BBPBAP Jepara, dan BPIUUK Karangasem untuk pengembangan udang vanname.

Guna memenuhi kebutuhan induk ikan air tawar di Sumatera, Ditjen Perikanan Budi Daya membangun instalasi *Broodstock Center* di 3 lokasi yaitu Kabupaten Mesuji, Musi Rawas dan Dharmasraya.

### 1.3. Potensi Dan Permasalahan

#### 1.3.1. Potensi

##### a. Wilayah Perairan yang Luas

Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang lebih dari 108.000 km dan luas laut mencapai 6,4 juta km<sup>2</sup>. Wilayah daratannya yang kaya akan sungai, danau, waduk, serta persawahan memberikan peluang besar bagi pengembangan perikanan budi daya baik di air tawar, payau, maupun laut (KKP, 2024).

Berdasarkan data FAO (2023), Indonesia merupakan produsen perikanan budi daya terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Produksi perikanan budi daya nasional pada tahun 2024 mencapai 24,85 juta ton, menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,65% per tahun selama periode 2020–2024. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budi daya global yang berada di kisaran 21% per tahun, menurut proyeksi FAO (2023).

##### b. Komoditas Unggulan yang Beragam

Komoditas perikanan budi daya di Indonesia sangat beragam, dengan kurang lebih 30 jenis ikan dan biota air lainnya yang dikembangkan secara komersial. Dari jumlah tersebut, 12 komoditas utama ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan perikanan budi daya, yaitu: Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*), Kerapu (*Cromileptes altivelis*), Kakap Putih (*Lates calcarifer*), Bandeng (*Chanos chanos*), Patin (*Pangasius sp.*), Nila (*Oreochromis niloticus*), Ikan mas (*Cyprinus carpio*), Lele (*Clarias sp.*), Gurame (*Osphronemus gouramy*), Rumput laut (*Kappaphycus sp.*; *Eucheuma sp.*; *Gracilaria sp.*; *Sargassum sp.*), Kepiting bakau (*Scylla serrata*) dan Ikan hias (*Scleropages formosus*, *Betta sp.*, *Astronotus ocellatus*, dll.). Di samping 14 komoditas utama di atas Indonesia juga

mengembangkan komoditas ikan lokal endemik dan komoditas ikan lainnya yang memiliki potensi ekonomi.

c. Lahan Budi Daya Potensial yang Luas dan Beragam

Luas lahan potensial untuk pengembangan perikanan budi daya di Indonesia mencakup wilayah perairan darat, pesisir, dan laut lepas yang terdiri dari potensi budi daya air tawar seluas lebih dari 2,83 juta hektar, budi daya air payau seluas 2,88 juta hektar dan budi daya laut seluas 12,12 juta hektar.

Pemanfaatan lahan budi daya ikan air tawar mencapai 211.799 hektar atau baru termanfaatkan sebesar 7,48 persen yang digunakan untuk budi daya dengan wadah budi daya kolam tanah, kolam beton, karamba, jaring apung (KJA), keramba jaring tancap (KJT) di waduk, danau, dan sungai. Pemanfaatan budi daya air payau baru sekitar 0,84 juta hektar yang dimanfaatkan secara aktif atau sebesar 29,25 persen yang menggunakan tambak tradisional, tambak semi-intensif dan tambak intensif di kawasan pesisir. Pemanfaatan budi daya air laut baru sekitar 1,5 persen atau 181 ribu hektar yang meliputi keramba jaring apung (KJA) laut dan wadah budi daya laut lainnya. Perikanan budi daya berdasarkan data tersebut masih sangat berpeluang untuk dikembangkan lebih baik karena tingkat pemanfaatan lahannya baru mencapai 6,89 persen dari total potensinya sebesar 17,92 juta hektar.

d. Penguasaan Teknologi Perikanan Budi Daya

Teknologi budidaya ikan di Indonesia saat ini masih sangat beragam, mulai dari sistem tradisional hingga sistem super intensif. Perbedaan tingkat teknologi ini ditentukan oleh input produksi, padat modal, dan kompleksitas manajemen operasional. Sebagian besar pembudi daya masih menggunakan teknologi sederhana atau semi-intensif, sementara adopsi teknologi intensif dan super intensif masih terbatas pada skala usaha menengah dan besar. Kesenjangan adopsi ini mengindikasikan adanya potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui penguasaan teknologi yang lebih maju.

Pengembangan teknologi modern seperti *recirculating aquaculture system* (RAS), sistem bioflok, dan otomatisasi pemantauan kualitas air (suhu, oksigen terlarut, pH, salinitas, dan kekeruhan) berbasis digital telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan air, serta mengurangi dampak lingkungan. Teknologi ini juga mendukung praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan tuntutan pasar global yang semakin peduli terhadap aspek *traceability* dan *eco-labeling* produk akuakultur.

Penerapan teknologi budidaya modern bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan usaha terhadap perubahan iklim, penyakit, dan fluktuasi harga input produksi. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan teknis, insentif investasi, kemitraan dengan sektor swasta, serta ekosistem inovasi yang mendorong transfer teknologi ke tingkat usaha kecil dan menengah. Dengan penguatan penguasaan teknologi, sektor perikanan budi daya Indonesia dapat bertransformasi menuju industri yang lebih efisien, adaptif, dan kompetitif di pasar global.

e. Sumber Daya Manusia yang Memadai

Sumber daya manusia adalah kunci dalam seluruh proses produksi perikanan budi daya, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pascaproduksi. SDM yang terampil dan berkualitas dapat mendorong adopsi teknologi, meningkatkan produktivitas, dan keberlanjutan usaha perikanan budi daya.

Jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar merupakan usia produktif merupakan potensi dalam pengembangan perikanan budi daya.

Jumlah penduduk ini juga didukung dengan keberadaan berbagai institusi yang mendorong tersedianya tenaga kerja bidang perikanan budi daya yang ahli, terdidik, terlatih, dan terampil.

Besarnya jumlah penduduk usia produktif di Indonesia merupakan pendorong bagi pemerintah untuk lebih mengembangkan sektor perikanan budi daya yang dapat membuka lapangan kerja. Keterlibatan generasi muda dalam perikanan budi daya akan mempercepat transformasi perikanan budi daya lebih berbasis pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Transformasi ini akan merubah perspektif generasi muda terhadap sub sektor perikanan budi daya menjadi industri yang menguntungkan dan berkelanjutan.

f. Jumlah Penduduk yang Besar dan Strategis bagi Pasar Domestik

Pemenuhan kebutuhan protein ikan yang sebelumnya dipenuhi dari kegiatan perikanan tangkap akan bergeser pada perikanan budi daya. pergeseran ini terjadi disebabkan oleh berbagai permasalahan pada perikanan tangkap seperti isu lingkungan, penurunan sumber daya ikan, dan isu kedaulatan. Hal ini ditunjang dengan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Ditjen PDSPKP KKP menunjukkan bahwa tilapia atau ikan nila memiliki tingkat serapan tertinggi pada tahun 2024 mencapai 1.32 juta ton. Tingkat serapan berikutnya adalah lele (0,59 juta ton), dan bandeng (0,52 juta ton).

Pola konsumsi masyarakat terkonsentrasi pada jenis ikan yang lebih mudah ditemukan dan tersedia sepanjang waktu. Salah satu pilihan utama masyarakat untuk konsumsi protein harian adalah ikan budi daya seperti bandeng, nila dan lele.

g. Pasar Ekspor yang Terbuka dan Meningkatkan

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pasar global perikanan budi daya, dengan produksi mencapai 6,37 juta ton pada tahun 2024 atau sekitar 6,7% dari total produksi akuakultur dunia. Komoditas unggulan seperti udang, nila, lele, dan bandeng berkontribusi besar terhadap volume produksi nasional, sementara rumput laut menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar kedua dunia, dengan produksi 10,81 juta ton atau 29,6% dari total produksi global.

Lima komoditas "*champion*" perikanan budi daya—udang, nila salin, kepiting, rumput laut, dan lobster—menunjukkan potensi ekonomi yang besar dengan total nilai pasar global mencapai lebih dari USD 109 miliar. Udang menempati posisi teratas dengan nilai pasar USD 64,8 miliar dan pangsa pasar Indonesia sebesar 6,1% pada 2023, menempatkan Indonesia sebagai eksportir udang kelima terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai USD 1,73 miliar. Nila atau tilapia, meskipun sebagian besar untuk konsumsi domestik, mencatat nilai ekspor sebesar USD 81,77 juta dan terus meningkat. Sementara itu, rumput laut menegaskan kekuatan Indonesia sebagai eksportir kedua terbesar secara global dengan kontribusi signifikan terhadap pasar dunia.

Namun demikian, potensi besar ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa komoditas seperti lobster dan kepiting memiliki nilai pasar tinggi (masing-masing USD 8,7 miliar dan USD 12,47 miliar), tetapi pangsa pasar Indonesia masih terbatas. Untuk memperluas ekspor, dibutuhkan penguatan kualitas produk, sistem sertifikasi, efisiensi logistik rantai pasok, serta promosi pasar non-tradisional. Dengan strategi peningkatan daya saing dan keberlanjutan, sektor perikanan budi daya Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok akuakultur global.

### 1.3.2. Permasalahan

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan budi daya yang besar, masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat dan menjadi tantangan pertumbuhan sektor ini. Berdasarkan data terbaru hingga 2024, tantangan beserta dampak yang dihadapi, antara lain:

#### a. Ketersediaan dan Keterbatasan Distribusi Induk Unggul dan Benih Bermutu

Ketersediaan induk dan benih unggul masih menjadi tantangan utama dalam perikanan budi daya Indonesia. Produksi induk dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, khususnya untuk komoditas seperti udang vannamei yang masih bergantung pada impor. Upaya pemerintah membangun Broodstock Center belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan ini. Di sisi lain, akses terhadap benih berkualitas masih terbatas, terutama di daerah sentra produksi terpencil. Banyak pembudi daya masih menggunakan benih dari sumber yang tidak tersertifikasi, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kelangsungan hidup, pertumbuhan tidak seragam, dan meningkatnya risiko penyakit dan mortalitas.

Kualitas benih sangat bergantung pada kualitas induk. Tanpa induk yang sehat dan tersertifikasi, mustahil menghasilkan benih unggul secara konsisten. Benih bermutu penting untuk efisiensi usaha, mempercepat panen, mengurangi biaya pakan, dan menghasilkan produk budi daya yang memenuhi standar pasar.

Sebaliknya, penggunaan benih yang tidak bermutu menurunkan produktivitas, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan daya saing produk akuakultur nasional. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan induk, sertifikasi mutu, dan sistem distribusi benih menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan sektor ini.

Masalah utama bibit rumput laut di Indonesia adalah ketergantungan pada bibit hasil perbanyakan vegetatif; yaitu potongan tanaman yang diambil berulang kali dari induk yang sama. Praktik ini menyebabkan menurunnya kualitas genetik bibit dan membuatnya lebih rentan terhadap penyakit. Bibit yang lemah daya tahannya mudah terserang stres lingkungan, seperti perubahan suhu, salinitas, atau pencemaran. Meskipun teknologi modern seperti seleksi marka molekuler dan kultur jaringan sudah tersedia untuk menghasilkan bibit unggul, penerapannya di kalangan pembudi daya masih sangat terbatas karena minimnya pelatihan dan infrastruktur pendukung yang mendorong adopsi teknologi tersebut.

#### b. Tingginya Harga Pakan dan Pakan Berkualitas Rendah

Tingginya harga pakan menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan perikanan budi daya di Indonesia. Pakan menyumbang 60–70% dari total biaya produksi, dan mayoritas bahan bakunya masih bergantung pada impor seperti bungkil kedelai, tepung ikan, dan minyak nabati. Ketergantungan ini menyebabkan industri pakan sangat sensitif terhadap dinamika harga global. Kenaikan harga yang terus terjadi memaksa banyak pembudi daya skala kecil beralih ke pakan murah yang kualitas nutrisinya rendah.

Penggunaan pakan berkualitas rendah berdampak negatif terhadap performa produksi, antara lain pertumbuhan ikan yang lambat, konversi pakan yang buruk, dan tingginya residu pakan yang mencemari lingkungan perairan. Kombinasi antara harga pakan yang mahal dan harga jual hasil panen yang fluktuatif mengurangi margin keuntungan dan meningkatkan risiko usaha. Hal ini berdampak langsung terhadap rendahnya minat investasi, sulitnya akses pembiayaan, dan lemahnya daya saing produk budi daya di pasar ekspor yang mensyaratkan standar mutu tinggi.

Upaya pemerintah seperti menjembatani kepentingan antara produsen dan pembudi daya serta mendorong inovasi pakan alternatif telah dilakukan, namun belum cukup menyelesaikan masalah di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terintegrasi untuk mengembangkan pakan lokal berkualitas, memperkuat rantai pasok domestik, dan menstabilkan harga pakan. Keberhasilan sektor perikanan budi daya sangat bergantung pada tersedianya pakan yang terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan sebagai fondasi utama produktivitas dan keberlanjutan usaha.

c. Penyakit Ikan, Kualitas Lingkungan dan Perubahan Iklim

Penyakit ikan akibat virus, bakteri, jamur, dan parasit masih menjadi tantangan besar dalam perikanan budi daya di Indonesia. Serangan penyakit dapat menyebabkan kematian massal dalam waktu singkat, menimbulkan kerugian ekonomi, dan menurunkan produktivitas nasional. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya penerapan biosekuriti di lapangan, serta terbatasnya fasilitas tanggap darurat dan tenaga teknis di daerah. Upaya seperti vaksinasi, penggunaan probiotik, dan monitoring kesehatan belum dilakukan secara konsisten dan merata.

Permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan kualitas lingkungan perairan yang terus menurun. Minimnya implementasi regulasi lingkungan dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah menyebabkan pencemaran air baku dan meningkatnya risiko kontaminasi pada produk budi daya. Selain itu, penggunaan pakan berlebih dan kepadatan tebar yang tinggi tanpa didukung pengolahan limbah melalui IPAL telah memicu akumulasi limbah organik dan eutrofikasi, yang memperburuk kondisi ekosistem perairan dan mempercepat penyebaran penyakit.

Dampak perubahan iklim juga memperberat tekanan terhadap sistem budi daya. Kenaikan suhu air, fluktuasi salinitas, serta pola hujan dan cuaca ekstrem meningkatkan stres fisiologis ikan dan menurunkan imunitasnya. Tanpa pengelolaan kualitas air yang ketat, sistem budidaya menjadi semakin rentan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola lingkungan melalui penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), pembangunan dan penggunaan IPAL, serta pendekatan kawasan terpadu menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan, keberlanjutan, dan daya saing sektor perikanan budi daya.

d. Alih Fungsi Lahan dan Ketidakpastian Peruntukan Ruang Budi Daya

Perubahan peruntukan ruang dan lemahnya pengendalian tata guna lahan menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan kegiatan perikanan budi daya. Alih fungsi lahan dari zona budi daya menjadi zona lain seperti pariwisata, permukiman, industri, dan komersial telah menyebabkan berkurangnya ketersediaan ruang yang diperuntukkan secara khusus bagi kegiatan budi daya perikanan. Perubahan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya menghambat minat investasi dan kontinuitas usaha.

Ketidakpastian alokasi ruang ini diperparah oleh lemahnya penegakan regulasi pemanfaatan ruang serta kurangnya koordinasi antar sektor di tingkat daerah. Dalam banyak kasus, zona budi daya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah digeser atau dikurangi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha perikanan. Akibatnya, pelaku budi daya menghadapi risiko tumpang tindih dengan aktivitas sektor lain dan minimnya jaminan perlindungan ruang produksi.

Selain itu, perubahan peruntukan dan kegiatan non-perikanan di sekitar kawasan budi daya sering menimbulkan dampak lingkungan, seperti peningkatan cemaran dan degradasi kualitas air. Hal ini terjadi karena minimnya kontrol terhadap aktivitas eksternal yang berpotensi

mengganggu keseimbangan ekosistem budi daya. Tanpa kepastian ruang dan perlindungan terhadap kawasan produksi, keberlanjutan dan efisiensi sektor perikanan budi daya akan semakin terancam.

e. Keterbatasan Prasarana dan Sarana Pendukung Budi Daya

Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung merupakan faktor penting dalam menunjang produktivitas dan efisiensi usaha perikanan budi daya. Namun di banyak wilayah sentra produksi, masih dijumpai berbagai keterbatasan infrastruktur dasar seperti keterbatasan sumber air, saluran irigasi yang dangkal dan tidak terhubung dengan baik, jalan produksi yang rusak atau belum tersedia, serta akses terhadap listrik yang belum stabil atau bahkan belum terjangkau. Kondisi ini menghambat kelancaran distribusi input dan output budidaya, meningkatkan biaya operasional, serta menurunkan daya saing pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah.

Selain itu, sarana teknis budi daya seperti wadah budi daya (tambak, kolam, keramba), peralatan panen, sistem aerasi, dan instalasi pendukung lainnya sering belum memenuhi standar teknis yang layak. Banyak pembudi daya masih menggunakan peralatan konvensional yang tidak efisien, mudah rusak, dan tidak ramah lingkungan. Kurangnya standarisasi terhadap peralatan dan mesin budi daya juga menyebabkan variasi produktivitas yang tinggi antar pelaku usaha, serta menyulitkan dalam proses pelatihan, pendampingan, maupun pembiayaan berbasis teknologi.

Upaya modernisasi sarana prasarana budidaya juga masih menghadapi hambatan dalam aspek regulasi, pembiayaan, dan integrasi lintas sektor. Penerapan teknologi seperti sistem resirkulasi, efisiensi energi, dan pemantauan kualitas air berbasis sensor masih belum tersebar luas. Keterbatasan infrastruktur pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan budi daya juga menyebabkan peningkatan risiko pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan dan standarisasi prasarana-sarana budidaya secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendorong efisiensi usaha, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan transformasi sistem budi daya ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

f. Kelembagaan dan Akses Permodalan Terbatas

Kelembagaan usaha perikanan budi daya di Indonesia masih didominasi oleh pembudi daya skala kecil yang menjalankan usaha secara perorangan, tidak tergabung dalam kelembagaan formal yang kuat, dan belum memiliki struktur organisasi, sistem usaha, maupun jejaring pasar yang memadai. Posisi kelembagaan pembudi daya umumnya lemah, baik dari sisi representasi, daya tawar, maupun kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Hal ini menyebabkan skala usaha sulit ditingkatkan, kapasitas produksi tidak efisien, dan rentan terhadap risiko usaha, serta fluktuasi harga.

Kondisi tersebut diperparah oleh terbatasnya akses terhadap permodalan, terutama dari lembaga keuangan formal. Banyak pelaku usaha tidak memiliki agunan, legalitas usaha, atau kelayakan administrasi yang dipersyaratkan perbankan. Akibatnya, pengembangan usaha sangat bergantung pada bantuan pemerintah atau hibah jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Ketergantungan ini memperkuat siklus stagnasi usaha dan memperlemah kemandirian pembudi daya, baik dari aspek keuangan, produksi, maupun kelembagaan.

Untuk memperkuat keberlanjutan usaha, diperlukan upaya peningkatan kapasitas teknis dan manajerial pelaku budi daya agar mampu mengelola usaha secara modern dan profesional. Penguatan kelembagaan dalam bentuk koperasi, kelompok usaha bersama, atau korporatisasi pembudi daya juga menjadi krusial untuk meningkatkan

efisiensi, akses pasar, dan kelayakan pembiayaan. Tanpa intervensi yang sistematis dan kolaboratif, transformasi sektor budi daya menuju sistem usaha yang berdaya saing akan sulit terwujud.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

### 2.1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2025-2029 sejalan dengan Visi Presiden serta Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai unit kerja yang berperan sentral dalam pembangunan subsektor perikanan budi daya, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendukung transformasi ekonomi biru melalui praktik budi daya yang efisien, adaptif terhadap perubahan iklim, dan inklusif bagi pelaku usaha skala kecil. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya turut mendorong peningkatan kapasitas produksi, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan penyediaan pangan akuatik berkualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan mandat dan peran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menetapkan visi jangka menengah tahun 2025–2029 sebagai berikut:

“Perikanan Budi Daya yang Maju, Berkelanjutan, dan Tangguh untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat.”

Penjelasan elemen visi tersebut adalah sebagai berikut:

- **Maju:** Mewakili transformasi sektor perikanan budi daya menuju sistem yang modern dan efisien, melalui peningkatan penggunaan teknologi, digitalisasi proses produksi, inovasi kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- **Berkelanjutan:** Menunjukkan komitmen terhadap praktik budi daya yang menjaga keseimbangan ekologi, memperhatikan daya dukung lingkungan, dan menjamin keberlangsungan usaha dari sisi sosial maupun ekonomi.
- **Tangguh:** Menggambarkan ketahanan sektor budi daya dalam menghadapi dinamika global dan tantangan lokal, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga input, risiko penyakit ikan, dan gangguan rantai pasok. Visi ini mencerminkan daya adaptasi, resiliensi, dan stabilitas sistem budidaya secara menyeluruh.
- **Ketahanan pangan dan kesejahteraan Masyarakat:** Menjadi tujuan utama pembangunan, yaitu menjadikan subsektor perikanan budi daya sebagai sumber protein hewani yang aman dan bergizi serta sebagai pendorong ekonomi rakyat, khususnya di wilayah pesisir dan perdesaan.

### 2.2. Misi

Mengacu pada mandat tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana kebijakan teknis di bidang perikanan budi daya, serta dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan visi Presiden melalui Asta Cita 2025–2029, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkomitmen melaksanakan misi pembangunan yang sejalan dengan Misi Asta Cita ke-2, 4, dan 5, yaitu:

1. Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Mendukung Asta Cita ke-2 dan 5)
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas (Mendukung Asta Cita ke-4)

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menetapkan misi sektoral tahun 2025–2029 sebagai arah pelaksanaan program dan strategi pembangunan subsektor perikanan budi daya yang mencerminkan keberpihakan terhadap produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan pelaku utama. Misi ini menjadi landasan dalam perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang terukur.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029 adalah:

1. Meningkatkan produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan sebagai kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian pelaku utama perikanan budi daya.
3. Mengembangkan sistem usaha perikanan budi daya yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi.
4. Memperkuat tata kelola subsektor perikanan budi daya yang profesional, transparan, dan digital.

### 2.3. Tujuan

Sebagai penjabaran langsung dari misi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029, ditetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan subsektor perikanan budi daya. Tujuan ini mendukung pencapaian visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, transformasi ekonomi biru, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029:

1. Meningkatkan volume, efisiensi, dan kesinambungan produksi perikanan budi daya dalam rangka memperkuat penyediaan protein akuatik nasional secara berkelanjutan, berbasis kawasan produktif dan teknologi ramah lingkungan.
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya tahan usaha pembudi daya melalui penguatan kelembagaan, dukungan sarana produksi, akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas usaha berbasis potensi lokal.
3. Mengembangkan sistem usaha budidaya yang responsif terhadap tantangan iklim dan teknologi melalui penyediaan input produksi berkualitas, penerapan inovasi budidaya modern, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana berstandar.
4. Mewujudkan tata kelola subsektor perikanan budi daya yang akuntabel, efisien, dan berbasis data dengan memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, digitalisasi layanan publik, dan kinerja Badan Layanan Umum sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

### 2.4. Sasaran Program

Sasaran program pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai suatu hasil dan dampak (*outcome*) dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: SP1. Meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan; SP2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudidaya; dan SP3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan budi daya, dengan uraian sebagai berikut:

2.4.1. Sasaran Program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah: meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan dengan indikator kinerja:

- a. Volume produksi rumput Laut dengan target 11,64 juta ton di 2025 dan 14,14 juta ton di 2029;

- b. Volume produksi ikan budi daya dengan target 6,75 Juta Ton di 2025 dan 8,52 Juta Ton di 2029; dan
- c. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi) dengan target 103,25 di 2025 dan 104,25 di tahun 2029.

2.4.2. Sasaran Program ke-dua (SP-2) yang akan dicapai adalah: meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudi daya, dengan indikator kinerja: jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya dengan target 10 unit di 2026 dan 15 unit di 2029.

2.4.3. Sasaran Program ke-tiga (SP-3) yang akan dicapai adalah: tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan budi daya, dengan Indikator Kinerja: Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yaitu: 86 di tahun 2025 dan 88 di tahun 2029.

Sasaran Program di atas mendukung pencapaian dua Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni SS-2: Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan dan SS-5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas. Berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah disusun indikasi risiko yang menjadi dasar penguatan Manajemen Risiko lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan indikasi risiko ini dilakukan melalui proses identifikasi untuk mengenali dan menentukan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran strategis, sehingga langkah mitigasi dapat dirumuskan secara lebih terarah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 4. Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis KKP terkait Perikanan Budi Daya Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis		Indikasi Risiko
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Peningkatan dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan wabah penyakit ikan
		2	Peningkatan harga input dan sarana produksi perikanan
		3	Ketidapatuhan pelaku usaha terhadap regulasi kelautan dan perikanan
		4	Belum optimalnya adopsi teknologi pada sektor kelautan dan perikanan
		5	Keterbatasan konektivitas dan infrastruktur dasar yang memadai di pesisir dan pulau-pulau kecil
		6	Perubahan kebijakan nasional atau daerah terkait tata ruang, rencana zonasi dan pemanfaatan ruang laut
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	1	Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan alur koordinasi dan tanggung jawab
		2	Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dalam transformasi tata kelola pemerintahan
		3	Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan jalur koordinasi dan tanggung jawab

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
		4 Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dan transformasi tata kelola pemerintahan
		5 Belum optimalnya tingkat implementasi budaya birokrasi berkAKHLAK

Sumber : Renstra KKP 2025 - 2029

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan KKP terkait pelaksanaan Prioritas Nasional yang merupakan Misi Asta Cita dari Presiden dan wakil Presiden. Strategi pembangunan perikanan budi daya sesuai dengan RPJMN 2025-2029 tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Prioritas Nasional Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas terkait Perikanan Budi Daya dalam RPJMN 2025-2029

No	Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1	PN 2-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada pangan	Pengembangan pangan akuatik ( <i>Blue Food</i> )
		Pembangunan Rendah Karbon	Penurunan Emisi Karbon berbasis Lahan
		Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	1. Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru 2. Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern dan Berkelanjutan
2	PN-5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut

RPJMN 2025–2029 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 memuat Indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu proyek atau program strategis yang berdampak besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan, khususnya Program Prioritas Presiden seperti Terobosan (Terbaik) Cepat. PSN difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, berperan aktif dalam mendukung pencapaian PSN dengan menjalankan program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas, pemerataan pembangunan, dan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Indikasi PSN yang telah ditetapkan melalui RPJMN 2025-2029 salah satunya adalah: Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Kawasan Pantura (Pantai Utara) Jawa yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana KKP dan swasta. Program ini bertujuan untuk memulihkan kawasan budi daya yang mengalami degradasi, meningkatkan produktivitas tambak melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, serta memberdayakan Pembudi daya melalui pendampingan, akses permodalan, dan penguatan klaster usaha. Selain itu proyek ini juga mendukung penyediaan protein ikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Indikasi PSN tersebut diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan

Kedelapan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Program Strategis Nasional (PSN) Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029

No	Daftar Program Strategis Nasional	Keterangan Program Strategis Nasional
1.	Program Revitalisasi Tambak Pantura di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
2.	Program Pengembangan Budi Daya udang Terintegrasi ( <i>Integrated Shrimp Farming</i> ) di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional, dimana sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi *engine growth* pertumbuhan ekonomi. Posisinya sebagai motor penggerak pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor.
2. Ekologi sebagai Panglima, dimana ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan.
3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*), dimana ekonomi biru merupakan solusi untuk menjawab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis. Sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.
4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan yaitu: (i) tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah; (ii) holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan; (iii) integratif, melalui sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan (iv) spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antar wilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya. Empat

pendekatan ekonomi biru dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru ditetapkan lima arah kebijakan strategis KKP, yaitu:

#### 3.1.1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir, laut dan perairan umum, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dampak positif dari kebijakan ini antara lain adalah terlindunginya habitat, menjaga struktur ekosistem, meningkatkan kemampuan penyerapan karbon, terlindunginya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan potensi sumber daya ikan.

#### 3.1.2. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota

PIT merupakan penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona PIT, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak positif dari kebijakan ini adalah terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan yang legal, diatur, dan dilaporkan, menjaga stok sumber daya ikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 3.1.3. Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui praktik budi daya perikanan yang memperhatikan lingkungan dengan memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem. Produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan menjadi peran kunci dalam penyediaan pangan akuatik selain perikanan tangkap. Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan budi daya dalam negeri diprioritaskan pada 5 (lima) komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yaitu udang, tilapia, rumput laut, kepiting, dan lobster.

#### 3.1.4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir, mencegah aktivitas ilegal, kerusakan lingkungan, dan mendukung pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan agar pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, sesuai daya dukung lingkungan, serta mampu mencegah konflik kepentingan antarpemangku kepentingan. Selain melindungi ekosistem, kebijakan ini juga mendorong pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan.

#### 3.1.5. Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

Sampah plastik di laut menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan kesehatan masyarakat pesisir. Sebagian besar sampah plastik berasal dari aliran sungai, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan, serta aktivitas di laut. Untuk mengatasi persoalan ini, KKP menginisiasi laut bebas sampah melalui gerakan partisipasi nelayan, yaitu pendekatan kolaboratif yang melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam pembersihan laut. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik.

Dari kelima arah kebijakan tersebut, kebijakan nomor 3 yaitu pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan merupakan fokus utama Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat peran perikanan budi daya sebagai lumbung pangan akuatik yang dapat memenuhi kebutuhan protein nasional secara berkelanjutan. Dengan mendorong adopsi teknologi modern ramah lingkungan, standarisasi proses produksi, dan penguatan klaster-klaster budidaya unggul. Kebijakan ini akan meningkatkan kapasitas produksi, nilai tambah produk, dan daya saing di pasar domestik serta internasional.

### 3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Perikanan Budi Daya

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berperan sentral dalam mewujudkan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ketiga, yaitu “Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan”. Sebagai sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan, perikanan budi daya diarahkan menjadi tulang punggung penyediaan pangan bergizi masa depan (*blue food*) yang dapat diproduksi secara berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Pemerintah secara aktif mendorong ekspansi dan transformasi perikanan budi daya sebagai solusi strategis untuk meningkatkan produksi pangan akuatik, mengurangi tekanan terhadap stok ikan liar akibat *overfishing*, serta menciptakan lapangan kerja produktif di kawasan pesisir dan pedesaan. Dalam konteks ekonomi biru (*blue economy*), sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia protein hewani, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk menjalankan arah kebijakan pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, dilakukan strategi-strategi berikut:

#### 3.2.1. Meningkatkan Produktivitas Perikanan Budi Daya Secara Berkelanjutan

Strategi untuk meningkatkan produktivitas perikanan budi daya secara berkelanjutan difokuskan pada komoditas ekspor unggulan seperti udang, rumput laut, lobster, kepiting, nila, dan komoditas ekspor penting lainnya, serta komoditas perikanan budi daya yang dikonsumsi masyarakat untuk mendukung program swasembada pangan antara lain dilakukan melalui:

- a. mengalokasikan kawasan pengembangan perikanan budi daya dalam dokumen tata ruang;
- b. melakukan revitalisasi kawasan perikanan budi daya sebagai model penerapan perikanan budi daya produktif dan berkelanjutan di Pantura Jawa dan kawasan sentra produksi lainnya;
- c. membangun kawasan budi daya terintegrasi khususnya di Indonesia Timur dan lokasi potensial lainnya sebagai pusat pertumbuhan baru bagi industri perikanan;
- d. membangun modeling kawasan produksi budi daya berbasis komoditas unggulan seperti udang, tilapia, rumput laut, kepiting, lobster, kakap putih, ikan hias, dan komoditas unggulan lainnya termasuk modeling penyediaan benih, penyediaan induk unggul, dan pakan mandiri;
- e. membangun dan merehabilitasi infrastruktur serta prasarana dan sarana perikanan budi daya berkelanjutan seperti saluran irigasi, jalan produksi, wadah budi daya serta peralatan dan mesin;
- f. meningkatkan layanan kesehatan ikan dan lingkungan yang didukung dengan peralatan dan sistem monitoring yang handal;
- g. mendorong kemandirian produksi pakan berbasis bahan baku lokal untuk menekan biaya produksi; dan

- h. mengoptimalkan produksi ikan hias untuk meningkatkan nilai tambah perikanan budi daya.

### 3.2.2. Meningkatkan Akses dan Adopsi Teknologi di Bidang Budi Daya Perikanan

Peningkatan adopsi teknologi dalam sektor perikanan budi daya menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem produksi yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk menjawab tantangan produktivitas, keterbatasan lahan dan air, serta tuntutan pasar global terhadap praktik budi daya yang ramah lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan terintegrasi yang mencakup penerapan teknologi budi daya, pengolahan pakan, dan sistem otomasi berbasis digital. Adapun strategi yang dapat ditempuh meliputi:

- a. pengembangan teknologi budi daya modern dan efisien, seperti: *Recirculating Aquaculture System* (RAS) untuk sistem tertutup yang hemat air dan lahan, Sistem bioflok untuk meningkatkan kepadatan tebar dan efisiensi pakan, Penguatan sarana dan prasarana pendukung teknologi tersebut di tingkat pembudi daya;
- b. peningkatan kemandirian pakan, dengan cara: mendorong adopsi teknologi pembuatan pakan skala kecil bagi pembudi daya, memproduksi pakan buatan berkualitas tinggi yang terjangkau dan sesuai kebutuhan nutrisi ikan, pengembangan formulasi pakan lokal yang berbasis bahan baku lokal; dan
- c. penerapan otomatisasi dan digitalisasi budi daya berbasis *Internet of Things* (IoT), antara lain: Penggunaan sensor digital untuk memantau suhu, oksigen terlarut, salinitas, pH, dan kekeruhan air secara *real-time*; sistem pengingat dan pengendalian otomatis untuk pemberian pakan dan aerasi, integrasi *dashboard* pemantauan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

### 3.2.3. Menciptakan Ekosistem Usaha Perikanan Budi Daya yang Adil dan Efisien

Strategi untuk menciptakan ekosistem usaha perikanan budi daya yang dapat meningkatkan nilai tukar pembudi daya dengan menjaga struktur biaya tetap efisien dan wajar antara lain dilakukan melalui:

- a. membangun kampung perikanan merah putih tematik komoditas perikanan budi daya sebagai sentra produksi pangan dan lumbung pangan desa yang disesuaikan dengan preferensi konsumsi ikan masyarakat lokal;
- b. meningkatkan perlindungan bagi pembudi daya ikan diantaranya melalui fasilitasi pra-sertifikasi lahan perikanan budi daya, peningkatan akses pelaku usaha untuk mendapatkan insentif pupuk, serta meningkatkan akses pembudi daya terhadap jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan nasional;
- c. meningkatkan kapasitas, kemitraan, dan kelembagaan pelaku usaha budi daya, termasuk pengembangan koperasi untuk memperkuat posisi tawar di setiap sentra produksi;
- d. memfasilitasi akses pembiayaan usaha pembudi daya dengan memanfaatkan teknologi digital;
- e. Penyediaan sarana dan/atau prasarana produksi sebagai stimulus usaha khususnya bagi pembudi daya ikan skala kecil;
- f. Pemberdayaan bagi pembudi daya ikan dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, pembinaan untuk penyiapan sertifikasi perikanan budi daya, serta peningkatan kapasitas dan kelembagaan pelaku usaha budi daya; dan
- g. meningkatkan kapasitas Badan Layanan Umum (BLU) dan kualitas dalam penyelenggaraan layanan teknis seperti penyediaan input produksi,

pengujian sampel laboratorium, penyediaan ikan konsumsi dan layanan teknis lainnya yang didukung dengan sistem informasi dalam rangka mewujudkan modernisasi BLU.

#### 3.2.4. Penguatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, strategi arah kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diarahkan tidak hanya pada peningkatan kinerja program kelautan dan perikanan, tetapi juga pada penguatan Reformasi Birokrasi sebagai fondasi utama pelaksanaannya. Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjadi instrumen strategis dalam memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana secara efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Strategi untuk penguatan tata kelola reformasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dilakukan melalui:

- a. meningkatkan sinergi perencanaan strategis lintas sektor dan lintas unit organisasi termasuk penguatan perencanaan dan pelaksanaan di sub sektor perikanan budi daya, mendorong keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, dan pengukuran kinerja organisasi agar selaras dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional, serta meningkatkan kolaborasi pendanaan inovatif non-APBN;
- b. mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib dan efisien;
- c. penguatan organisasi, tata kerja yang efektif dan efisien, penyederhanaan sistem kerja, dan penataan jabatan;
- d. meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perjanjian nasional, serta produk hukum lainnya dan penyediaan informasi hukum yang responsif;
- e. meningkatkan komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif, serta memperluas kerja sama internasional melalui diplomasi perikanan yang proaktif, sejalan dengan kepentingan nasional;
- f. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan internal meliputi urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, persuratan dan kearsipan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. mengembangkan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan strategis organisasi, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa yang kompetitif dan berintegritas; meningkatkan pengelolaan data statistik dan informasi yang andal, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti untuk mendukung efisiensi layanan publik;
- h. menganalisis dan merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan data dan fakta yang valid (*evidence-based policy*) serta melaksanakan integrasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mendiseminasikan rekomendasi kebijakan yang memberikan dampak dan manfaat di bidang perikanan budi daya; dan
- i. mengoptimalkan kinerja dan pendapatan BLU 2025-2029 melalui rasionalisasi target kinerja layanan teknis dan keuangan (pendapatan) pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) sesuai dengan dinamika kebijakan dan dukungan anggaran Rupiah Murni (RM).

Selain beberapa strategi utama di atas, kebijakan pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan akan

didukung oleh *enablers* atau pihak lain terkait yang dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain:

### 3.2.5. Penguatan Sistem Jaminan Mutu Perikanan Budi Daya

Strategi untuk penguatan sistem jaminan mutu produk perikanan budi daya antara lain dilakukan melalui:

- a. menjamin kualitas mutu produk perikanan budi daya yang memenuhi standar keamanan pangan (*Food Safety Standard*);
- b. meningkatkan keberterimaan produk perikanan budi daya di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan penanganan kasus mutu;
- c. menguatkan layanan pengujian mutu dan layanan inspeksi produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; dan
- d. menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir.

### 3.2.6. Meningkatkan Ekspor, Konsumsi Dalam Negeri, Hilirisasi, Investasi, dan Logistik Perikanan Budi Daya

Strategi untuk meningkatkan investasi, hilirisasi, logistik, dan akses pasar perikanan budi daya berkelanjutan antara lain dilakukan melalui:

- a. meningkatkan ekspor komoditas perikanan budi daya bernilai ekonomis tinggi;
- b. secara aktif terlibat dalam upaya negosiasi tarif dagang produk perikanan budi daya termasuk mendorong diplomasi ekonomi dan penyelesaian sengketa dagang;
- c. mengatasi hambatan non-tarif produk perikanan budi daya melalui kerja sama, diplomasi perdagangan, dan pemenuhan persyaratan pasar;
- d. menurunkan tarif pada produk ekspor perikanan budi daya ekonomis tinggi melalui perjanjian kerja sama dengan negara mitra strategis;
- e. diversifikasi pasar dan perluasan perdagangan ekspor produk perikanan budi daya melalui kesepakatan perdagangan bilateral maupun multilateral;
- f. hilirisasi dan industrialisasi perikanan budi daya untuk meningkatkan nilai tambah berdasarkan prinsip nir-limbah serta penyediaan prasarana dan sarana;
- g. meningkatkan konsumsi ikan budi daya berbasis preferensi konsumsi lokal melalui edukasi dan kampanye gizi ikan kepada masyarakat, dan diversifikasi produk olahan termasuk penanganan *stunting* serta membangun model kuliner pangan berbasis ikan budi daya;
- h. meningkatkan akses pasar dalam negeri melalui modeling outlet pemasaran ikan dan pemasaran digital (*e-commerce* ikan segar/olahan);
- i. mengembangkan sentra atau pusat industri pengolahan ikan budi daya skala mikro kecil;
- j. memperkuat distribusi, ketersediaan, dan aksesibilitas produk perikanan budi daya melalui implementasi sistem logistik ikan nasional termasuk dukungan terhadap penyediaan menu ikan pada program MBG;
- k. meningkatkan investasi dalam negeri melalui fasilitasi perizinan dan kemudahan berusaha, penyiapan peluang informasi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor, promosi investasi, dan pendampingan realisasi investasi; dan
- l. meningkatkan kelas usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan melalui fasilitasi literasi keuangan, akses pembiayaan, kemitraan usaha, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

### 3.2.7. Penguatan Pengawasan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Strategi untuk penguatan pengawasan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan dilakukan melalui:

- a. meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan dan penegakan hukum serta menyelenggarakan kampanye digital melalui media sosial untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan budi daya;
- b. melibatkan masyarakat secara aktif dan memperkuat kapasitas Pokmaswas melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan sarana dalam pengawasan perikanan budi daya;
- c. mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang cepat tanggap, terintegrasi secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran perikanan budi daya secara efektif;
- d. menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan indikator skala usaha dan riwayat pelanggaran serta mendorong penerapan kepatuhan sukarela pada unit usaha budi daya ikan;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis digital, citra *drone*, dan sistem digitalisasi untuk pemantauan kawasan budi daya, termasuk deteksi dini terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas ilegal;
- f. memperkuat intelijen pengawasan melalui pemanfaatan *open-source intelligence* (OSINT) dan *crowd data crawling* guna memperoleh informasi pelanggaran perikanan budi daya secara lebih komprehensif;
- g. melaksanakan pengawasan terpadu terhadap perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha perikanan budi daya air payau dan laut dengan melibatkan instansi terkait;
- h. memperkuat sistem ketertelusuran perikanan budi daya serta melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);
- i. meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran di subsektor perikanan budi daya, dengan tetap mengedepankan prinsip *ultimum remedium*; dan
- j. meningkatkan kapasitas dan jumlah pengawas perikanan melalui rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi guna memperkuat fungsi pengawasan perikanan budi daya.

Penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan, meningkatkan efisiensi pendanaan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Seluruh kebijakan pembangunan harus holistik, terintegrasi, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden 2025–2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, dan komitmen global Indonesia seperti WTO, UNCLOS 1982, serta ketentuan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO).

Dalam perencanaan pembangunan, pengarusutamaan berperan penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya mengejar target sektoral, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas dan melindungi lingkungan. Melalui pendekatan ini, program pembangunan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem, sehingga hasil pembangunan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga mendukung keadilan antargenerasi dan ketahanan nasional menghadapi tantangan global.

Pengarusutamaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Renstra KKP 2025-2029, menggunakan 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan. Tujuan dari

pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas manfaat dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan pembangunan perikanan budi daya tahun 2025-2029 meliputi:

1) Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi untuk memasukkan pertimbangan gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dalam upaya mendukung pelaksanaan PUG, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pedoman ini dimaksudkan untuk membimbing setiap unit kerja dalam menyusun rencana pembangunan yang responsif gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Untuk mempercepat implementasi PUG di sektor ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, DJPB menerapkan sejumlah strategi, yaitu:

- a. penguatan tujuh prasyarat PUG, meliputi: komitmen pimpinan, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, kelembagaan yang kuat, penyediaan sumber daya, data yang terpilah berdasarkan gender, penggunaan alat analisis gender, serta keterlibatan masyarakat secara inklusif;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. pembuatan profil gender untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan gender di sektor perikanan budi daya;
- d. pemenuhan hak anak serta fasilitasi kelompok rentan dalam layanan sektor perikanan budi daya; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di bidang perikanan budi daya.

2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Pelaksanaan TPB/SDGs memerlukan integrasi yang kuat antar berbagai dimensi pembangunan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga dimensi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya. Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya akan memperkuat komitmen dalam mencapai target TPB/SDGs ke-14, yaitu Ekosistem Laut (*Life Below Water*), yang mencakup sejumlah isu strategis antara lain:

- a. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;
- b. melestarikan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- c. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan; dan
- d. menyediakan akses untuk pembudi daya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir.

3) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital bertujuan memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital. Strateginya mencakup penguatan ekosistem, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan big data. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, upaya ini diwujudkan melalui layanan digital terintegrasi, penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM digital, kerja sama layanan digital, penerapan *one data* SPBE, perizinan online, serta penguatan usaha perikanan budi daya melalui *e-commerce*.

4) Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon di sektor perikanan budi daya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas produksi yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara produktivitas produksi dan daya lingkungan bagi generasi mendatang. Implementasi pembangunan rendah karbon pada kegiatan perikanan budi daya berupa serangkaian upaya untuk menurunkan potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari aktivitas perikanan budi daya.

Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan dan perikanan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, yang mencakup salah satunya penerapan NEK dalam kegiatan Pembudidayaan ikan. Pelaksanaan NEK di sektor perikanan budi daya difokuskan pada praktik budi daya ikan ramah lingkungan, efisiensi energi dan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), inovasi teknologi rendah emisi melalui efisiensi pakan dan pengelolaan air buangan, serta pengelolaan karbon biru (seperti ekosistem mangrove dan lamun yang terkait dengan kawasan budi daya). Upaya ini juga mencakup pengolahan dan pemasaran hasil budi daya berkelanjutan.

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha budi daya, lembaga riset, dan masyarakat didorong melalui adopsi teknologi ramah lingkungan, penerapan praktik budi daya berkelanjutan, serta pembiayaan usaha dan investasi hijau. Dengan demikian, perikanan budi daya tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga kesehatan ekosistem darat dan pesisir.

5) Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi penting dalam sub sektor perikanan budi daya untuk mengurangi ancaman dari dampak perubahan iklim. Secara umum potensi dampak perubahan iklim terhadap perikanan budi daya adalah ancaman penurunan produktivitas dan pendapatan. Selain itu, perubahan iklim dalam jangka panjang berdampak langsung pada kerusakan tambak dan fasilitas budi daya akibat banjir, abrasi, atau kenaikan muka air laut, fluktuasi suhu dan salinitas air yang mengganggu pertumbuhan ikan, asidifikasi, perubahan cuaca yang berakibat pada perubahan siklus budi daya serta meningkatnya risiko serangan penyakit ikan yang sensitif terhadap perubahan iklim.

Untuk mengatasi hal tersebut, penerapan pembangunan berketahanan iklim di sektor perikanan budi daya mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penguatan infrastruktur perikanan budi daya yang tahan iklim, adopsi teknologi budi daya ramah iklim (seperti resirkulasi dan tambak berkelanjutan), perbaikan tata kelola dan akses pendanaan iklim, serta peningkatan

kapasitas pembudi daya dan instansi terkait dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan pendekatan ini, sektor perikanan budi daya diharapkan mampu bertahan, beradaptasi, sekaligus tetap produktif di tengah tantangan perubahan iklim.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendorong harmonisasi regulasi, yakni menghilangkan tumpang tindih peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya antar kementerian/Lembaga, maupun dengan peraturan di tingkat daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merupakan implementasi *omnibus law*.

Pada periode 2025-2029 kerangka regulasi yang berkaitan dengan perikanan budi daya yang akan disusun/direvisi sebagaimana terdapat pada Lampiran 4.

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

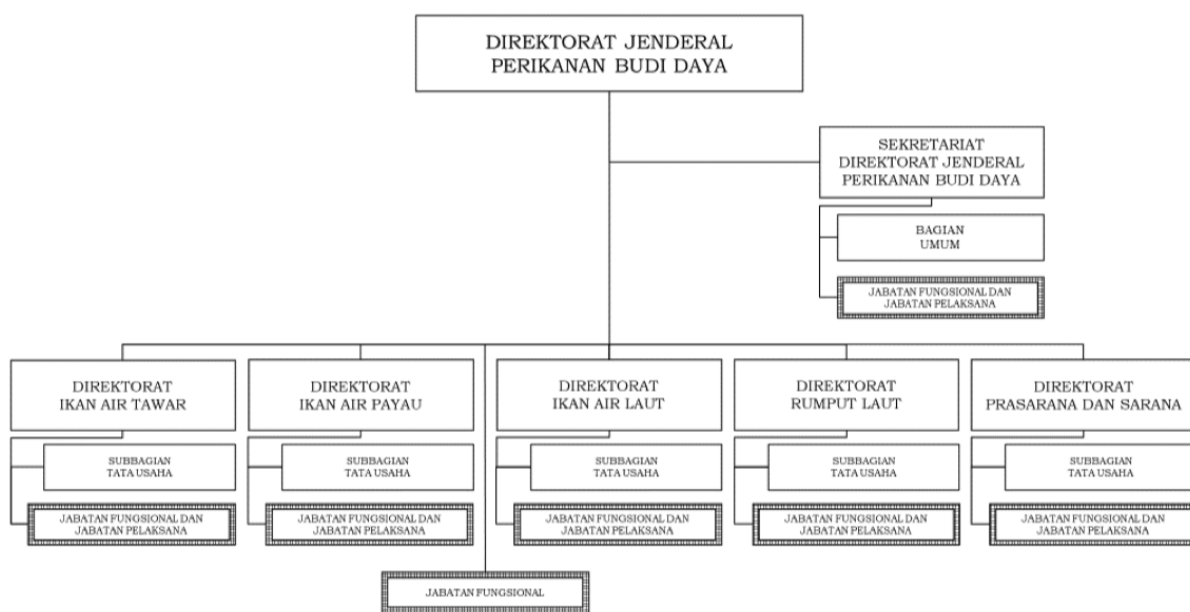
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan Pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana Pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan Pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan

- pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
  - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Direktorat Teknis serta 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis (3 satker BLU dan 12 satker PNBP) yang tersebar di wilayah Republik Indonesia dengan gambaran struktur Organisasi sebagaimana berikut:



Gambar 3. Bagan Susunan Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya.

Mempertimbangkan perkembangan dinamika organisasi dan beban kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta kondisi geografis terkait dengan rentang kendali UPT Perikanan Budi Daya, maka pada tahun 2025-2029 diperlukan rasionalisasi penataan organisasi UPT Perikanan Budi Daya melalui peningkatan eselonering dan penyesuaian tugas fungsi UPT eksisting serta pembentukan beberapa UPT baru di lokasi potensial di Indonesia.

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, pengelolaan sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat krusial. SDM yang berkualitas dan tersedia dalam jumlah yang memadai merupakan pondasi utama dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan yang telah dirumuskan. Secara kualitas, pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya harus memiliki kompetensi yang relevan dengan *core business* perikanan budi daya. Namun tidak hanya kompetensi teknis saja yang dibutuhkan, tetapi dibutuhkan pula diantaranya kemampuan manajerial, kepemimpinan, digitalisasi dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional maupun dinamika global yang saat ini telah menjadi suatu keharusan di tengah tuntutan digitalisasi layanan publik dan penguatan tata kelola berbasis data. Sementara itu, dari sisi kuantitas, kebutuhan pegawai juga harus disesuaikan dengan beban kerja dan kompleksitas tugas-tugas di unit kerja. Oleh karena itu, perencanaan SDM berbasis data (analisis jabatan, analisis

beban kerja, peta jabatan) menjadi kunci untuk memastikan distribusi pegawai yang efektif.

Selama ini, pengelolaan SDM di sektor publik sering kali berfokus pada aspek administratif, seperti pengangkatan, penempatan, dan penggajian. Namun, untuk menjawab tantangan zaman dan mendorong efektivitas birokrasi, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya perlu bertransformasi ke arah pendekatan *human capital-based management* yang menekankan pada optimalisasi potensi individu sebagai aset organisasi. Sebagaimana investasi dalam infrastruktur fisik, investasi dalam pengembangan modal manusia juga memiliki dampak jangka panjang. Selain itu, membangun *organizational learning culture* menjadi bagian penting dari pengembangan *human capital*. Organisasi yang terus belajar adalah organisasi yang mampu bertahan, berinovasi, dan berkembang dalam situasi apapun.

Pengelolaan SDM berbasis *human capital* merupakan investasi strategis yang harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Fokus pengelolaan tidak hanya terbatas pada jumlah pegawai yang dibutuhkan, tetapi juga pada kualitas kompetensi yang mereka miliki, nilai tambah yang diberikan bagi organisasi, serta kemampuan untuk berkembang sesuai tantangan zaman. Dengan pendekatan ini, SDM Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan besar kementerian, sekaligus memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan di tingkat nasional maupun global.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, diperlukan SDM aparatur memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja guna pencapaian target kinerja organisasi. Saat ini Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya didukung dengan jumlah SDM aparatur sebanyak 1.250 pegawai (data per 1 September 2025), yang terdiri atas 1.065 PNS dan 154 PPPK, dengan sebaran Tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 7. Sebaran Tingkat Pendidikan ASN DJPB Per September 2025

Tingkat Pendidikan	S3	S2	S1/D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD
Jumlah (orang)	8	223	528	156	2	309	10	14

Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 759 orang atau 60,72% pegawai telah memiliki Pendidikan minimal sarjana, sehingga dapat dikategorikan dalam jenjang keahlian. Sebanyak 491 orang atau 39,28% pegawai memiliki Pendidikan SD sampai D3 dikategorikan pada jenis jabatan keterampilan. Pada tahun 2025, terdapat tambahan pegawai sebanyak 574 orang sehingga total ASN Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya bertambah menjadi 1.639 orang.

Penambahan jumlah ASN tersebut masih jauh dibandingkan kebutuhan SDM aparatur berdasarkan hasil analisis beban kerja yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan, terdapat kebutuhan SDM aparatur sebanyak 4.309 formasi dalam berbagai jabatan untuk lima tahun ke depan. Sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1.400 orang pegawai.

Beberapa tantangan dalam tata kelola SDM aparatur antara lain: implementasi manajemen talenta untuk rencana suksesi jabatan kritikal yang belum optimal, karena masih terbatas pada tahap identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sehingga belum menghasilkan penetapan Kelompok Rencana Suksesi dan penempatan talenta yang efektif, GAP kompetensi pada HCDP belum terpetakan secara akurat akibat pemetaan talenta yang belum menyeluruh, sehingga pengukurannya masih mengandalkan penilaian subjektif atasan dan rekan kerja yang berpotensi bias, berdampak pada belum

teridentifikasinya kebutuhan pengembangan kompetensi secara tepat, pengembangan kompetensi melalui tugas belajar juga belum optimal karena terbatasnya informasi dan literasi mengenai jenis pendidikan yang selaras dengan kebutuhan organisasi; serta belum dilakukannya identifikasi sertifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan kritis, padahal kebijakan manajemen karier ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan mensyaratkan sertifikasi keahlian tertentu untuk menduduki jabatan tersebut.

Untuk menjawab tantangan tata kelola SDM seperti implementasi manajemen talenta yang belum optimal, kesenjangan (gap) kompetensi yang belum terpetakan secara akurat, serta keterbatasan dalam pengembangan kapasitas dan sertifikasi pemenuhan kebutuhan SDM periode 2025–2029 dirancang secara sistematis berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK), proyeksi peningkatan volume kerja, pembentukan unit kerja baru, bezetting, dan dinamika mutasi pegawai. Strategi ini mencakup tiga pendekatan utama:

1. Rekrutmen ASN melalui CPNS dan PPPK
  - a. CPNS: Diutamakan untuk memenuhi jabatan fungsional pendukung program prioritas DJPB, regenerasi akibat purna tugas dan mutasi, serta disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan ketersediaan anggaran.
  - b. PPPK: Fokus pada penyelesaian status tenaga non-ASN sesuai amanat peraturan (termasuk PPPK paruh waktu), pengembangan karier PPPK eksisting, serta perekrutan tenaga profesional non-PNS untuk memperkuat pelaksanaan program strategis.
2. Mobilitas Talenta  
Memanfaatkan skema mutasi antar instansi atau antar unit kerja sebagai respons cepat terhadap kebutuhan SDM di jabatan kritis, dengan dasar penilaian kompetensi yang objektif dan selaras dengan profil jabatan.
3. Penyesuaian dengan Kebutuhan Organisasi  
Seluruh skema pemenuhan SDM dikaitkan erat dengan peta kompetensi, rencana suksesi, dan identifikasi sertifikasi jabatan kritis, sehingga tidak hanya menutup kebutuhan kuantitas, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kesiapan SDM dalam mendukung transformasi organisasi jangka menengah.

Pemenuhan kebutuhan ASN melalui pengadaan ASN dengan fokus jabatan core bisnis organisasi, dan mobilitas talenta melalui mutasi masuk dari instansi lain sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Rencana Pemenuhan ASN 2025 - 2029 melalui mekanisme Pengadaan ASN dan Mutasi dari Instansi Lain

Pengangkatan Pertama*)										Mutasi dari instansi lain*)				
CPNS					PPPK									
2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
31	45	45	39	35	543	254	39	137	289	5	10	10	10	10

\*) rencana bersifat sementara, implementasi menyesuaikan kebijakan nasional pengadaan ASN

Strategi optimalisasi manajemen talenta dimulai dengan menyelesaikan proses identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta secara menyeluruh. Langkah ini penting agar dapat ditetapkan kelompok rencana suksesi dan dilakukan penempatan talenta secara tepat. Pemetaan talenta yang lengkap juga menjadi dasar untuk mengukur kesenjangan (gap) kompetensi pada HCDP pegawai menggunakan metode yang objektif, sehingga jenis pengembangan kompetensi yang dibutuhkan baik secara individu maupun organisasi dapat ditentukan dengan akurat.

Selain itu, identifikasi sertifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan kritis menjadi fokus utama dalam tata kelola SDM aparatur. Hal ini sejalan dengan kebijakan manajemen karier ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

mensyaratkan sertifikasi keahlian tertentu untuk menduduki jabatan kritis. Upaya ini mencakup penetapan kompetensi inti tiap jabatan kritis serta identifikasi sertifikasi dan pelatihan teknis yang relevan guna mendukung pelaksanaan tugas secara efektif.

BAB IV  
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik dan mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*Outcome*) dari suatu program. Rumusan program mengacu pada konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang disusun berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I, tapi lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian/Lembaga. Program dapat bersifat lintas unit Eselon I dalam satu K/L atau bersifat lintas K/L.

Terdapat dua program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yaitu:

- a. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan; dan
- b. Program Dukungan Manajemen.

Adapun indikator kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Indikator Kinerja Program Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 - 2029

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Meningkatnya produksi perikanan budi daya					
	Produksi perikanan budi daya (ikan)	6,75	7,15	7,58	8,04	8,52
	Produksi perikanan budi daya (rumpun laut)	11,64	12,22	12,83	13,47	14,14
2.	Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi)	103.25	103.5	103.75	104	104.25
3.	Korporasi Perikanan Budi Daya	-	10	10	13	15
Program Dukungan Manajemen						
1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Persen)	85	86	87	88	89
2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Persen)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Persen)	81	82	83	84	85
4.	Nilai Pembangunan Integritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	76	77	78	79	80
5.	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Jenderal	84,00	84,20	84,40	84,60	84,80

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Perikanan Budi Daya (Nilai)					
6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	92,00	92,10	92,15	92,20	92,20
7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50
8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
9.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Indeks)	81	87,50	88	88,50	89
10.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (persen)	96	97	98	99	100
11.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100	100	100	100	100
12.	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	80	81	82	83	84
13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Persen)	76	77	78	79	80
14.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Persen)	65	85	85	85	85
15.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	77	78	79	80	81

Adapun target produksi perikanan budi daya berdasarkan komoditas utama adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Target Produksi Perikanan Budi Daya berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2025 – 2029

No.	KOMODITAS	TAHUN					LAJU KENAIKAN (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	
	<b>TOTAL</b>	<b>18 393 000</b>	<b>19 380 000</b>	<b>20 420 000</b>	<b>21 517 000</b>	<b>22 665 000</b>	<b>5,36</b>
1	Udang	1.258.000	1.356.000	1.459.000	1.570.000	1.689.000	7,64
2	Rumput Laut	11.640.000	12.222.000	12.833.000	13.475.000	14.140.000	4,98
3	Bandeng	946.000	993.000	1.044.000	1.098.000	1.154.000	5,09
4	Kerapu	20.000	21.000	23.000	24.000	24.000	4,72
5	Kakap	12.000	12.000	13.000	15.000	16.000	7,60
6	Kekerangan	44.000	46.000	47.000	48.000	50.000	3,25
7	Ikan Mas	614.000	650.000	688.000	727.000	769.000	5,79
8	Nila	1.555.000	1.660.000	1.776.000	1.894.000	2.019.000	6,75
9	Lele	1.271.000	1.354.000	1.445.000	1.541.000	1.640.000	6,58
10	Patin	355.000	362.000	370.000	379.000	387.000	2,18
11	Gurame	211.000	223.000	235.000	247.000	261.000	5,46
12	Kepiting	22.000	23.000	25.000	26.000	27.000	5,27
13	Lobster	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	8,78
14	Lainnya	444.000	456.900	460.800	471.700	487.600	2,37
	<b>Ikan</b>	<b>5.495.000</b>	<b>5.802.000</b>	<b>6.128.000</b>	<b>6.472.000</b>	<b>6.836.000</b>	<b>5,61</b>
	<b>Rumput Laut</b>	<b>11.640.000</b>	<b>12.222.000</b>	<b>12.833.000</b>	<b>13.475.000</b>	<b>14.140.000</b>	<b>4,98</b>
	<b>Udang</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>7,64</b>

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan budi daya 2025–2029 serta mencapai sasaran utama, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan dikelola secara transparan serta akuntabel. Sumber pendanaan berasal dari berbagai pihak, meliputi APBN, APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), sektor swasta, lembaga perbankan dan non-perbankan, serta masyarakat dan dunia usaha melalui kemitraan dan investasi. Jenis sumber anggaran yang digunakan mencakup Rupiah Murni (RM), PNBP, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), Pinjaman Luar Negeri, Hibah, Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan sumber lain seperti dana CSR, dana desa, atau dana kolaboratif yang sesuai ketentuan.

Target pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 2025-2029 perlu memperhatikan evaluasi capaian kinerja layanan teknis dan keuangan 2023-2024. Untuk itu Rencana Strategi Bisnis (RSB) BLU perlu dirasionalkan sesuai dengan dinamika kebijakan dan ketersediaan dukungan anggaran Rupiah Murni (RM).

Prinsip yang diacu adalah bahwa penggunaan dana yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya harus fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan nilai nyata bagi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budi daya. Dengan pendekatan ini, pendanaan tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah pesisir dan pedesaan.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan perikanan budi daya menurut program dan kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang bersumber dari APBN sebagaimana disajikan di lampiran II.

## BAB V PENUTUP

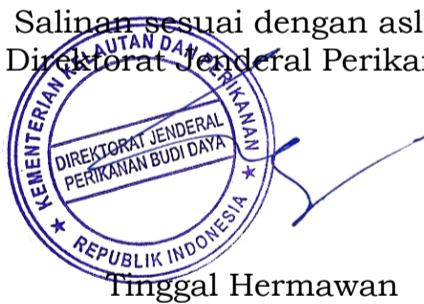
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif guna mendukung ketahanan pangan nasional dan global, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi biru. Melalui Rencana Strategis Tahun 2025–2029, pembangunan sektor ini akan dijalankan dengan pendekatan strategis berbasis keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini didukung oleh kebijakan yang kondusif, regulasi yang adaptif, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, sehingga mampu mengakselerasi transformasi sektor perikanan budi daya menjadi pilar utama pembangunan nasional.

Untuk memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029. Evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan untuk ; (i)menilai kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan, (ii)mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan, (iii)menelaah penerapan manajemen risiko pembangunan nasional; dan (iv)menilai penerapan pembiayaan inovatif pemerintah dan pembiayaan non-pemerintah.

Dengan demikian pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi instrumen yang tidak hanya mengarahkan kebijakan dan program, tetapi juga memastikan bahwa capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam lima tahun ke depan terukur, akuntabel dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,  
Ttd.  
TB.HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Tinggal Hermawan

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 473 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN  
BUDI DAYA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
TAHUN 2025-2029

NO	
1.	Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan Per Program, Per Kegiatan, dan Per Output Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029
2.	Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/PSN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029
3.	Kerangka Regulasi Pembangunan Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,  
Ttd.  
TB.HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Tinggal Hermawan

1. MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN PER PROGRAM, PER KEGIATAN DAN PER OUTPUT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2025 – 2029

RENSTRA DJPB 2025 - 2029														
KO DE	URAIAN	INDIKATOR	SATU AN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya									1.052.839,7	4.374.449	8.192.980	6.989.900	2.334.347
	Program Dukungan Manajemen									356.225,1	357.902	527.427	532.876	541.895
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan budi daya	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	86,0	86,5	87,0	87,5	88,0						
2348	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya									356.225,1	357.902	527.427	532.876	541.895
SK	01-Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya													
ISK 1		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	Persen	85	86,00	87,00	88,00	89,00						
ISK 2		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	Persen	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5						
ISK 3		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	Persen	81	82,00	83,00	84,00	85,00						
ISK 4		Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	76	77,00	78,00	79,00	80,00						
ISK 5		Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	84	84,20	84,40	84,60	84,80						
ISK 6		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	92	92,10	92,15	92,20	92,20						
ISK 7		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	81,5	81,75	82,00	82,25	82,50						
ISK 8		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
ISK 9		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	Indeks	81	81,50	82,00	82,50	83,00						
ISK 10		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya (persen)	Persen	96	92,00	98,00	99,00	100,00						
ISK 11		Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
ISK 12		Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	80	81,00	82,00	83,00	84,00						
ISK 13		Persentase rencana umum pengadaan PEJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan	Persen	76	77,00	78,00	79,00	80,00						

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Budi Daya (Persen)											
ISK 14		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	Persen	65	66,00	85,00	85,00	85,00					
ISK 15		Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	77	78,00	79,00	80,00	81,00					
CAN	Sarana Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi			53		15	15	15					
001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	53		15	15	15					
051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		unit	53		15	15	15					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan	1.647	1.582	1.990	1.990	1.990					
956	Layanan BMN	Jumlah Layanan BMN	Layanan	5									
Z06	Layanan BMN	Jumlah Layanan BMN	Layanan		1	1	1	1					
957	Layanan Hukum	Jumlah Layanan Hukum	Layanan	1									
958	Layanan Hubungan Masyarakat	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	20									
Z02	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan		1	1	1	1					
Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Layanan		15	15	15	15					
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Jumlah Layanan Manajemen Organisasi	Layanan	1									
962	Layanan Umum	Jumlah Layanan Umum	Layanan	16	16	16	16	16					
963	Layanan Data dan Informasi	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	39	6	6	6	6					
994	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan										
001	Gaji dan Tunjangan Pegawai satker lingkup DJPB		Orang	1.549	1.527	1.935	1.935	1.935					
002	Operasional Kantor dan Pemeliharaan di satker lingkup DJPB		Satker	16	16	16	16	16					
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1					
951	Layanan Sarana Internal	Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1					
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang	1.607	1.527	1.935	1.935	1.935					
954	Layanan Manajemen SDM	Jumlah Layanan Manajemen SDM	Orang	1.607									
Z11	Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil	Jumlah Layanan Manajemen SDM	Orang		1.527	1.935	1.935	1.935					
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen	178	158	158	158	158					
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Layanan Perencanaan dan Anggaran	Layanan	58									
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	66									
Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan		17	17	17	17					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Layanan		141	141	141	141					
955	Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	54									
Z26	Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Layanan		12	13	13	14					
Z27	Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Layanan		12	13	13	14					
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	16		16	16	16					
AEC	Kerja Sama		Dokumen	3	3	3	3	3					
001	Kerja Sama bidang perikanan budi daya	Jumlah Kerja Sama bidang perikanan budi daya	Dokumen	3	3	3	3	3					
AEA	Koordinasi		Dokumen		2	2	2	2					
001	Koordinasi Pengelolaan Manajerial	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Manajerial	Dokumen		2	2	2	2					
	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan								696.614,5	4.016.547	7.665.553	6.457.024	1.792.452
SP1	Meningkatnya produksi perikanan budi daya	Volume Produksi Ikan Budi Daya (Juta Ton)	Juta Ton	18	19	20	22	23					
ISP 1		01. Volume Produksi Ikan	Juta Ton	7	7	8	8	9					
ISP 2		02. Volume Produksi Rumput Laut	Juta Ton	12	12	13	13	14					
ISP 3		03. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	103	104	104	104	104					
SP2	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi Pembudidaya (DJPB)												
		01. Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya	Unit		10	10	13	15					
7021	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut								22.989,0	30.140	168.800	43.875	119.600
SK	Terkelolanya Sistem Budi Daya Rumput Laut												
ISK 1		Jumlah Sarana/Kawasan budi daya rumput laut yang dikembangkan dan disalurkan ke masyarakat	Unit	171	201	310	311	704					
ISK 2		Jumlah Kawasan budi daya rumput laut yang dibangun dan direvitalisasi	Unit		1	11	6	6					
ISK 3		Jumlah Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat	Unit	37.500	62.231	60.000	60.000	80.000					
ISK 4		Jumlah Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina penerapan Sertifikasi	Unit	14	20	200	300	400					
ISK 5		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut yang disusun	Rekomendasi kebijakan	6	10	10	10	10					
ISK 6		Jumlah Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut yang dikembangkan	Unit		6	6	6	6					
BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga												
001	Unit Budi Daya yang dibina penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	01-Jumlah Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Lemba ga	14									
QA B	Pelayanan Publik kepada				20	200	300	400					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	lembaga												
002	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut	01-Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut	Lemba ga		20	200	300	400					
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			6	-	-	-	-					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Rumput Laut	Rekom endasi Kebijak an	6									
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			-	3	10	10	10					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Rumput Laut	Rekom endasi Kebijak an		3	10	10	10					
QED	Bantuan Tanaman			37.500	62.231	60.000	60.000	80.000					
001	Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	Unit	37.500	62.231	60.000	60.000	80.000					
QEG	Bantuan Peralatan / Sarana			171	201	310	311	704					
001	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit	170	200	300	310	700					
002	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas	01-Jumlah Infrastruktur Kawasan Budidaya Rumput Laut yang dibangun	Unit	1	1	1	1						
003	Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	01-Jumlah Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	Unit					1					
004	Kampung Perikanan Budi Daya Rumput Laut yang dikembangkan	01-Jumlah Kampung Perikanan Budi Daya Rumput Laut yang dikembangkan	Unit			9		3					
RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan			-	1	11	6	6					
001	Kawasan budidaya rumput laut terintegrasi	01-Jumlah Kawasan budidaya rumput laut terintegrasi	Unit			3	-	-					
002	Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	01-Jumlah Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	Unit		1	2							
003	Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut yang dikembangkan	01-Jumlah laboratorium kultur jaringan rumput laut yang dikembangkan	Unit			6	6	6					
7022	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau								550.414,7	3.747.135	6.786.911	5.585.361	812.295
SK	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau												
ISK1		Jumlah Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke masyarakat	ekor	43.041.521	110.611.709	56.020.010	61.521.223	67.022.236					
ISK2		Jumlah Kampung Budi Daya Ikan Air Payau yang dikembangkan	Unit	-	-	2	3	3					
ISK3		Jumlah Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Ikan Konsumsi Air Payau/Udang yang diproduksi UPT	Unit	39.656.298	88.818.869	53.108.500	59.359.000	65.710.000					
ISK4		Jumlah Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT	Unit	94.670	106.102	116.712	128.383	500.000					
ISK5		Jumlah Unit Usaha budi daya ikan air payau yang dilakukan pembinaan	Unit	207	380	586	614	640					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		sertifikasi											
ISK 6		Jumlah Sampel ikan air payau/pakan ikan/obat ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	sampel	5.003	9.421	10.363	11.399	12.539					
ISK 7		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	Rekomendasi Kebijakan	6	10	10	10	10					
ISK 8		Jumlah Sampel monitoring residu, monitoring penyakit ikan dan surveillance AMR ikan air payau yang diuji	sampel	596	1.270	1.800	2.100	2.400					
ISK 9		Jumlah Kawasan budi daya ikan air payau/udang yang dibangun atau direvitalisasi	Unit	1	1	11	11	15					
ISK 10		Jumlah Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat	unit	25									
ISK 11		Jumlah Infrastruktur Budi Daya Udang yang dibangun	Unit	7	7	7							
<b>BAB</b>	<b>Pelayanan Publik kepada lembaga</b>			<b>207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>001</b>	Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	01-Jumlah Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Lembaga	<b>15</b>									
<b>002</b>	Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	01-Jumlah Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Lembaga	<b>185</b>									
<b>003</b>	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	01-Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	Lembaga	<b>7</b>									
<b>QA B</b>	<b>Pelayanan Publik kepada lembaga</b>			<b>-</b>	<b>380</b>	<b>586</b>	<b>614</b>	<b>640</b>					
004	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	01-Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	Lembaga		380	586	614	640					
<b>BJC</b>	<b>Penyidikan dan Pengujian Penyakit</b>			<b>5.003</b>	<b>9.421</b>	<b>10.363</b>	<b>11.399</b>	<b>12.539</b>					
U01	Sampel Residu Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Residu Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	228									
U02	Sampel Kualitas Air Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Kualitas Air Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	3.127									
U03	Sampel Patologi Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Patologi Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	198									
U04	Sampel Mikrobiologi Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Mikrobiologi Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	680									
U05	Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	675									
U06	Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Payau	01-Jumlah sampel nutrisi pakan Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	38									
U07	Sampel Obat Ikan Air Payau	01-Jumlah sampel obat ikan Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	27									
U08	Sampel Mutu Pakan Ikan Air Payau	01-Jumlah sampel mutu pakan Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	30									
001	Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau	01-Jumlah Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau	Sampel		9.234	10.157	11.173	12.290					





RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
003	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	01-Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	Lembaga	7									
QA B	<b>Pelayanan Publik kepada lembaga</b>			-	200	100	100	100					
004	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	01-Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	Lembaga		200	100	100	100					
BJC	<b>Penyidikan dan Pengujian Penyakit</b>			1.993	1.842	2.494	2.743	3.019					
U01	Sampel Residu Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Residu Ikan Air Laut yang diuji	sampel	54									
U02	Sampel Kualitas Air Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Kualitas Air Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	1.314									
U03	Sampel Patologi Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Patologi Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	88									
U04	Sampel Mikrobiologi Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Mikrobiologi Ikan Air Laut yang diuji	sampel	324									
U05	Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Laut yang diuji	sampel	196									
U06	Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Laut	01-Jumlah sampel nutrisi pakan Ikan Air Laut yang diuji	sampel	17									
001	Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut	01-Jumlah Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut	sampel		1.842	2.494	2.743	3.019					
PBR	<b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>			6	-	-	-	-					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Air Laut	Rekomendasi Kebijakan	6									
ABR	<b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>			-	3	10	10	10					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Air Laut	Rekomendasi Kebijakan		3	10	10	10					
QEG	<b>Bantuan Peralatan / Sarana</b>			20	-	-	-	-					
001	Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Sarana budi daya Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit	20									
002	Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut yang dikembangkan	01-Jumlah kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut yang dikembangkan	Unit			2	3	3					
QEL	<b>Bantuan Hewan</b>			1.949.063	5.009.127	2.245.000	2.415.000	2.600.000					
U03	Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	ekor	174.574	448.658	250.000	300.000	350.000					
U04	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	ekor	1.774.489	4.560.469	1.995.000	2.115.000	2.250.000					
QJC	<b>Penyidikan dan Pengujian Penyakit</b>			145	556	165	175	200					
U01	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	01-Jumlah Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	70	340	80	85	100					
U02	Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	01-Jumlah Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) yang diuji	sampel	75	216	85	90	100					
RAL	<b>RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan</b>			384.654	1.151.752	1.205.000	1.435.000	1.728.000					
001	Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	01-Jumlah Calon Induk Kepiting yang diproduksi	Unit	89	5.747	2.000	3.000	5.000					

## RENSTRA DJPB 2025 - 2029

KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
002	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	01-Jumlah Calon Induk Ikan Air Laut yang diproduksi	Unit	10.037	5.612	65.000	75.000	85.000					
003	Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	01-Jumlah pakan ikan yang diproduksi di UPT	Unit	13.927		-	-	60.000					
004	Benih Kepiting yang diproduksi	01-Jumlah Benih Kepiting yang diproduksi	Unit	189.790	341.622	400.000	500.000	600.000					
005	Benih Ikan Laut yang diproduksi	01-Jumlah Benih Ikan Air Laut yang diproduksi	Unit	170.811	773.771	400.000	500.000	600.000					
007	Ikan Konsumsi air laut hasil budi daya yang diproduksi	01-Jumlah Ikan Konsumsi air laut hasil budi daya yang diproduksi	Unit		25.000	338.000	357.000	378.000					
<b>RB Q</b>	<b>Prasarana Bidang Kematriman, Kelautan, dan Perikanan</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					
001	Kluster Komoditas Unggulan Air Laut berbasis kawasan	01-Jumlah Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan yang dikembangkan	Unit	1	3	3	3	3					
<b>7024</b>	<b>Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar</b>								<b>80.697,3</b>	<b>49.957</b>	<b>149.994</b>	<b>206.806</b>	<b>211.659</b>
SK	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar												
ISK 1		Jumlah Produksi Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Ikan Konsumsi Ikan Air Tawar di UPT	Unit	7.622.161	3.254.926	12.932.501	14.048.401	15.171.100					
ISK 2		Jumlah Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	ekor	27.163.652	69.730.072	30.564.800	32.368.900	34.373.000					
ISK 3		Jumlah Pakan Ikan Air Tawar yang diproduksi untuk operasional UPT	Unit	147.806	107.122	117.834	129.618	400.000					
ISK 4		Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	Unit	375	410	455	505	540					
ISK 5		Jumlah Sampel ikan air tawar, pakan dan obat ikan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	sampel	2.960	2.342	4.140	4.558	5.013					
ISK 6		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	6	3	10	10	10					
ISK 7		Jumlah Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	Unit	-	15	21	21	21					
ISK 8		Jumlah Sampel monitoring residu, monitoring penyakit ikan dan Surveillance AMU/AMR ikan air tawar yang diuji	unit	325	1.379	1.850	2.050	2.200					
ISK 9		Jumlah Sarana/Kampung Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	unit	230	-	4	6	6					
ISK 10		Jumlah Kawasan Komoditas Unggulan Air Tawar yang dibangun atau direvitalisasi	unit	-	2	-	2	7					
ISK 11		Jumlah Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar yang dibangun	unit	-	3	3	3	3					
ISK 12		Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	Produk	38	-	-	-	-					
ISK 13		Jumlah Perikanan budi daya yang berkelanjutan dan bebas	Unit	2	1	1	1	-					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		konversi											
<b>BAB</b>	<b>Pelayanan Publik kepada lembaga</b>			<b>375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
001	Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	01-Jumlah Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Lembaga	70									
002	Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	01-Jumlah Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Lembaga	293									
003	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	01-Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	Lembaga	12									
<b>QA B</b>	<b>Pelayanan Publik kepada lembaga</b>			<b>-</b>	<b>380</b>	<b>455</b>	<b>505</b>	<b>540</b>					
001	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	01-Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	Lembaga		380	455	505	540					
<b>BJC</b>	<b>Penyidikan dan Pengujian Penyakit</b>			<b>2.960</b>	<b>2.342</b>	<b>4.140</b>	<b>4.558</b>	<b>5.013</b>					
U01	Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Tawar	01-Jumlah sampel nutrisi pakan Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	52									
U02	Sampel Obat Ikan Air Tawar	01-Jumlah sampel obat ikan Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	27									
U03	Sampel Mutu Pakan Ikan Air Tawar	01-Sampel Mutu Pakan Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	49									
U04	Sampel Residu Ikan Air Tawar Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Residu Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	213									
U05	Sampel Kualitas Air Ikan Air Tawar Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Kualitas Air Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	1.917									
U06	Sampel Patologi Ikan Air Tawar Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Patologi Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	89									
U07	Sampel Mikrobiologi Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Mikrobiologi Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	450									
U08	Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Tawar Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	163									
001	Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Tawar	01-Jumlah Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Tawar	sampel		2.300	3.837	4.224	4.646					
002	Sampel Pakan dan obat Ikan Air Tawar	01-Jumlah Sampel Pakan dan obat Ikan Air Tawar	sampel		42	303	334	367					
<b>PBR</b>	<b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>			<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Air Tawar	Rekomendasi Kebijakan	6									
<b>ABR</b>	<b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>			<b>-</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Air Tawar	Rekomendasi Kebijakan		3	10	10	10					
<b>QEG</b>	<b>Bantuan Peralatan / Sarana</b>			<b>230</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>					
001	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Sarana Budidaya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Unit	230									
002	Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar yang dikembangkan	01-Jumlah Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar yang dikembangkan	Unit			4	6	6					
<b>QEL</b>	<b>Bantuan Hewan</b>			<b>27.163.652</b>	<b>69.730.072</b>	<b>30.564.800</b>	<b>32.368.900</b>	<b>34.373.000</b>					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
U01	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	ekor	54.332	57.561	61.100	64.800	68.600					
U06	Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	ekor	27.108.670	69.669.753	30.500.000	32.300.000	34.300.000					
<b>QJC</b>	<b>Penyidikan dan Pengujian Penyakit</b>			<b>325</b>	<b>1.379</b>	<b>1.850</b>	<b>2.050</b>	<b>2.200</b>					
001	Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	01-Jumlah Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	150	168	800	850	900					
002	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	01-Jumlah Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	70	255	800	900	950					
U03	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	01-Jumlah Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	105	956	250	300	350					
<b>RAL</b>	<b>Sarana Bidang Kematriman, Kelautan, dan Perikanan</b>			<b>7.769.967</b>	<b>3.362.063</b>	<b>13.050.356</b>	<b>14.178.040</b>	<b>15.571.121</b>					
001	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	01-Jumlah Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	Unit	220.326	69.495	247.500	262.400	278.100					
002	Pakan Ikan yang diproduksikan untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	01-Jumlah Pakan Ikan yang diproduksikan untuk operasional UPT	Unit	147.806	107.122	117.834	129.618	400.000					
003	Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	01-Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	Unit	7.401.833	3.185.430	11.000.000	12.000.000	13.000.000					
004	Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	01-Jumlah Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	Unit		15	21	21	21					
005	Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	Unit	2	1	1	1	-					
007	Ikan Konsumsi air tawar hasil budi daya yang diproduksikan	Jumlah Ikan Konsumsi air tawar hasil budi daya yang diproduksikan	Unit			1.685.000	1.786.000	1.893.000					
<b>RB Q</b>	<b>Prasarana Bidang Kematriman, Kelautan, dan Perikanan</b>			<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					
001	Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	01-Jumlah prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar yang dikembangkan	unit		3	3	3	3					
002	Klaster Komoditas Unggulan Air Tawar Berbasis Kawasan	01-Jumlah klaster Komoditas Unggulan Air Tawar Berbasis Kawasan	unit		2		2	7					
<b>ACA</b>	<b>Perizinan Produk</b>			<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
003	Pakan dan Obat Ikan diregistrasi	01-Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	produk	38									
<b>794 1</b>	<b>Pengelolaan Prasarana dan Sarana</b>									<b>146.665</b>	<b>384.656</b>	<b>418.667</b>	<b>434.155</b>
<b>SK 1</b>	<b>Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya</b>												
ISK 1		Jumlah Rekomendasi teknis untuk perizinan usaha perikanan budi daya	Produk		-	1.200	1.250	1.300					
ISK 2		Jumlah Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat	Unit		723	880	1.044	1.204					
ISK 3		Jumlah Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat	unit		30	100	100	125					
ISK 4		Jumlah Prasarana produksi perikanan Budi Daya di UPT	Unit		1	21	21	21					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		yang dibangun atau direhabilitasi											
ISK 5		Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina	Lembaga		20	27	28	29					
ISK 6		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun	Rekomendasi Kebijakan		3	10	10	10					
<b>SK 2</b>	<b>Peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)</b>												
ISK 1		Jumlah Rekomendasi bidang lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi	Orang		1.000	2.000	2.000	2.000					
ISK 2		Jumlah Pembudidaya skala kecil yang terlindungi usahanya	orang		375	800	800	1.000					
<b>SK 3</b>	<b>Pemberdayaan kelembagaan ekonomi pembudidaya ikan melalui fasilitasi penguatan usaha</b>												
ISK 1		Jumlah Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat		3	10	13	15					
<b>ACA</b>	<b>Perizinan Produk</b>			-	-	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.300</b>					
<b>001</b>	<b>Rekomendasi teknis untuk perizinan usaha perikanan budi daya</b>	<i>01-Jumlah Rekomendasi teknis untuk perizinan usaha perikanan budi daya</i>	<b>Produk</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>					
002	Pakan dan Obat Ikan diregistrasi	<i>01-Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi</i>	produk			100	150	200					
<b>RB Q</b>	<b>Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan</b>			-	<b>31</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>146</b>					
002	Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (FITAF)	<i>01-Jumlah Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif</i>	Unit		30	100	100	125					
004	Prasarana produksi perikanan budi daya di UPT	<i>01-Jumlah prasarana produksi perikanan budi daya di UPT</i>	Unit		1	21	21	21					
005	Pembangunan Unit Pelaksana Teknis	<i>01-Jumlah Pembangunan Unit Pelaksana Teknis</i>	Unit										
<b>QE A</b>	<b>QEA-Bantuan Masyarakat</b>			-	<b>375</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>					
001	Pembudidaya rumput laut skala kecil yang terlindungi usahanya	<i>01-Jumlah Pembudidaya rumput laut skala kecil yang terlindungi usahanya</i>	Orang		42	200	200	100					
002	Perlindungan usaha budi daya skala kecil	<i>01-Jumlah Perlindungan usaha budi daya skala kecil</i>	Orang		333	600	600	900					
<b>QA B</b>	<b>Pelayanan Publik kepada lembaga</b>			-	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>					
<b>001</b>	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	<i>01-Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik</i>	Lembaga		<b>20</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>					
<b>QD C</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</b>			-	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>					
001	Rekomendasi bidang lahan budi daya yang akan disertifikasi	<i>01-Jumlah rekomendasi bidang lahan budi daya ikan yang akan disertifikasi</i>	Orang		1.000	2.000	2.000	2.000					
<b>QE G</b>	<b>Bantuan Peralatan / Sarana</b>			-	<b>502</b>	<b>880</b>	<b>1.044</b>	<b>1.204</b>					
001	Sarana Budi Daya Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	<i>01-Jumlah Sarana budi daya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat</i>	Unit		12	480	590	700					
002	Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	<i>01-Jumlah Sarana budi daya Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat</i>	Unit		50	50	54	54					

## RENSTRA DJPB 2025 - 2029

KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
003	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Sarana Budidaya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Unit		440	350	400	450					
<b>QD</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>			-	3	10	13	15					
001	Korporasi Pembudidayaan ikan yang dikembangkan	01-Jumlah Korporasi Pembudidayaan ikan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat		3	10	13	15					
<b>ABR</b>	<b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>			-	3	10	10	10					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya	Rekomendasi Kebijakan		3	10	10	10					

2. MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PSN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam miliar rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam miliar rupiah)					Total (dalam miliar rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>KP :</b> Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)  <b>ProP:</b> Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan Perikanan Budi Daya dan Revitalisasi Tambak Rakyat <sup>a*</sup>	6,75	7,15	7,58	8,04	8,52	-	200	400	400	400	-	5.000	7.400	7.400	4.800	-	5.200	7.800	7.800	5.200	-

Keterangan:

a\* : Indikasi Pendanaan Proyek Strategis Nasional Revitalisasi Tambak Pantura

3. KERANGKA REGULASI PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2025-2029

REGULASI	URGENSI	TARGET PENYELESAIAN	PIC
Permen KP Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan	Perlu adanya pengaturan sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi sektor perikanan	2025	Dit. Prasarana dan Sarana
Permen KP tentang Tata Kelola Pemanfaatan Air dan Lahan Pembudidayaan Ikan	Amanah Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan	2026	Dit. Prasarana dan Sarana
Permen KP tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan	Tindak lanjut dikeluarkan/tidak diakomodir perizinan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau obat ikan didalam PP Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko karena merupakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) & peralihan kewenangan sertifikasi bidang obat ikan (CPOIB & CDOIB) ke BP2MHKP (tidak di DJPB)	2026	Dit. Prasarana dan Sarana
Permen KP tentang Alat dan Mesin untuk Pembudidayaan Ikan.	Amanah Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan	2026	Dit. Prasarana dan Sarana